

**PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
(PAPSI) PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH***

(Studi Pada BPRS Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh

NINDI RIYANA SAPUTRI

NPM 1251010171

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1437 H/ 2016 M**

**PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
(PAPSI) PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH***

(Studi Pada BPRS Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh:

NINDI RIYANA SAPUTRI

NPM 1251010171

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak.

Pembimbing II : Ridwansyah, M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1437 H/ 2016 M**

ABSTRAK

Banyak masyarakat memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank yang berdasarkan prinsip jual beli, yaitu *murabahah*, *salam*, *istishna*. Pada BPRS Bandar Lampung pembiayaan berbasis jual-beli yang banyak diminati adalah pembiayaan *murabahah*. Di Indonesia standar akuntansi yang berlaku untuk perbankan syariah adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK), dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013. PAPSI 2013 mencakup penjelasan tentang laporan keuangan secara umum (mencakup kerangka dasar, komponen dan keterbatasan laporan keuangan).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi *murabahah* di BPRS Bandar Lampung dan apakah penerapan akuntansi *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung sesuai dengan PAPSI 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PAPSI pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung, untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung sesuai dengan PAPSI 2013.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan *verification*. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung adalah (1) Pengakuan dan Pengukuran: pada pengakuan dan pengukuran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2013 bagian IV; (2) Penyajian: pada penyajian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2013 bagian IV tetapi untuk *account* margin *murabahah* ditanggihkan dan beban potongan pelunasan disajikan dalam Laporan Keuangan Internal bank dan tidak disajikan dalam Laporan Keuangan yang dipublikasi; (3) pengungkapan: pada pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2013 bagian IV. Dalam hal penerapan PAPSI pada pembiayaan *murabahah*, dapat dinyatakan bahwa BPRS Bandar Lampung sepenuhnya sesuai dengan PAPSI Tahun 2013 bagian IV.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA (PAPSI) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH** (Studi pada BPRS Bandar Lampung). Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka perlu adanya penegasan judul tersebut.

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹ Penerapan dalam judul ini maksudnya adalah pelaksanaan PAPSI 2013 pada pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung apakah sudah diterapkan.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) adalah petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah.²

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.³ Pembiayaan dalam judul ini adalah pembiayaan yang ada pada BPRS Bandar Lampung yang terfokus pada pembiayaan *Murabahah*, dimana pembiayaan *murabahah* ini diminati oleh nasabah.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 1448.

² Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/> pada tanggal 21 september 2015

³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Bandung, 2009, hlm. 183.

⁴ Sri Nurhayati dan Warsilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 195

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵ BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana penerapan PAPSII di BPRS Bandar Lampung pada pembiayaan *murabahah* dan apakah penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung sesuai dengan PAPSII 2013.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis mengadakan penelitian tentang penerapan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia pada pembiayaan *murabahah* yang ada pada BPRS Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

BPRS Bandar Lampung menyediakan pembiayaan yang berbasis jual-beli yaitu pembiayaan *murabahah*, *salam*, *istishna*. Masyarakat memilih menggunakan pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan *salam* dan *istishna* karena sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Pencatatan akuntansi dibutuhkan sebagai acuan dalam mengambil keputusan atau laporan kepada pihak yang terkait, sehingga dibutuhkan acuan yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas transaksi-transaksi. Pihak BPRS menggunakan PAPSII tahun 2013 sebagai acuan dalam pencatatan transaksi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BPRS Bandar Lampung yang meliputi Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas transaksi *murabahah* yang ada pada BPRS Bandar Lampung.

⁵ Rizal yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 48.

2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin Ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam serta tersedianya literatur yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai referensi, dan lokasi penelitian yang mudah untuk dijangkau dari segi transportasi maupun dalam hal pengumpulan data.

C. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroprasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁶

Perbankan syariah yang pertama muncul di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan BMI adalah satu-satunya bank di Indonesia yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Setelah lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan mulailah di Indonesia banyak bermunculannya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berkembang secara pesat.

Adapun produk-produk yang terdapat pada Bank Syariah dan BPR Syariah adalah: produk penghimpunan dana ada 3, yaitu: (1) Tabungan : Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*, (2) Giro: Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*, dan (3) Deposito: Deposito *Mudharabah*. Produk penyaluran dana ada 3, yaitu: (1) prinsip bagi

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

hasil: *musyarakah, mudharabah*. (2) prinsip jual-beli: *murabahah, salam, istishna*. (3) prinsip sewa: *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit-tamlik*. Dan jasa-jasa yang diberikan berupa *wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qardh*.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷ BPRS yang terdapat di Bandar Lampung ada 9, yaitu: BPRS Bandar Lampung, BPRS Tanggamus, BPRS Metro Madani, BPRS Rajasa, BPRS Kota Bumi, BPRS Lampung Timur, BPRS Way Kanan, BPRS Mitra Agro Usaha, BPRS Aman Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. BPRS Bandar Lampung berlokasi di Jalan Pengeran Antasari No.148 - Bandar Lampung. Pada BPRS Bandar Lampung diantaranya tersedia layanan: (1) Produk penghimpunan dana: (a) tabungan syariah meliputi: tabungan *al-wadi'ah*, tabungan *al-mudharabah*, tabungan pelajar *al-mudharabah*. (b) deposito syariah. (2) Produk Penyaluran dana: (a) *murabahah*, (b) *musyarakah*, (c) *mudharabah*, (d) *multijasa*, (e) *salam*, (f) *istishna*.

Banyak masyarakat memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank yang berdasarkan prinsip jual beli, dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam melakukan kegiatannya, BPRS Bandar Lampung menyediakan fasilitas pembiayaan. Pembiayaan yang berbasis jual-beli diantaranya, *murabahah, salam, istishna*. Pembiayaan *murabahah* banyak dipilih

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 54.

masyarakat karena pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1, dibawah ini:

Tabel 1
Laporan Triwulan Periode Maret 2013 – September 2015

(Ribuan Rupiah)

Tahun	Bulan	Piutang <i>Murabahah</i>	Piutang <i>Salam</i>	Piutang <i>Istishna</i>
2013	Maret	8.266.305	0	0
	Juni	8.182.260	0	0
	September	7.628.869	0	0
	Desember	7.182.033	0	0
2014	Maret	9.534.999	0	0
	Juni	9.494.772	0	0
	September	8.677.304	0	0
	Desember	8.433.258	0	0
2015	Maret	14.203.241	0	0
	Juni	16.314.399	0	0
	September	16.556.622	0	0
	Desember	16.382.621	0	0

Sumber: Bank Indonesia

DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang pembiayaan *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah. Landasan syariah *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada

nasabah, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*.⁸

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁹ Dasar hukum diperbolehkannya jual-beli terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹⁰

Ada dua jenis *murabahah*, yaitu: (1) *Murabahah* dengan pesanan, yaitu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli dan bersifat mengikat, artinya pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. (2) *Murabahah* tanpa pesanan, yaitu penjual dapat langsung menyerahkan barang kepada pembeli karena telah memilikinya terlebih dahulu dan bersifat tidak mengikat.¹¹

Transaksi *murabahah* ini bersifat fleksibel dalam hal waktu pembayarannya, dalam praktiknya di perbankan tidak umum menggunakan pembayaran secara langsung setelah barang yang dipesan diterima oleh pembeli. Praktik yang banyak dilakukan di Indonesia adalah dengan mencicil setelah menerima barang. Pembayaran dengan cara sekaligus biasanya diberikan pada nasabah yang menerima pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayarnya secara periodik.

⁸ Diakses dari <http://www.Mui.go.id/> pada tanggal 17 Desember 2015

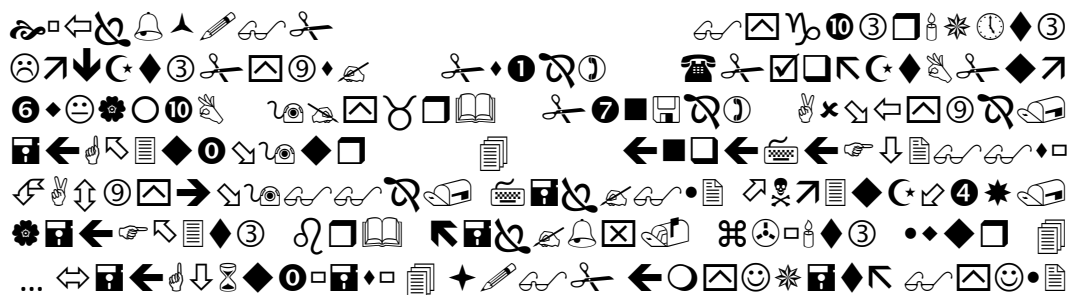
⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Akademia Permata, Jakarta, 2012, hlm. 141.

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 275

¹¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op. Cit.*, hlm. 177.

Adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah selayaknya dilakukan pencatatan atas transaksi-transaksi tersebut. Dalam hal ini, semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan selalu dilakukan pencatatan baik yang dilakukan oleh perbankan maupun non-perbankan. Dengan adanya pencatatan ini mudah untuk mengetahui kegiatan keuangan yang telah dilakukan sehingga dapat terkontrol. Pencatatan ini sudah menjadi suatu kewajiban untuk dilakukan guna menyajikan data-data keuangan berupa pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi ini berguna untuk memberikan informasi kepada pihak lain atas kegiatan keuangan yang ada dan sebagai acuan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang.

Di dalam Al-quran telah dijelaskan pentingnya fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar, dan manfaat. Seperti yang terkandung dalam surat al-baqarah ayat 282:

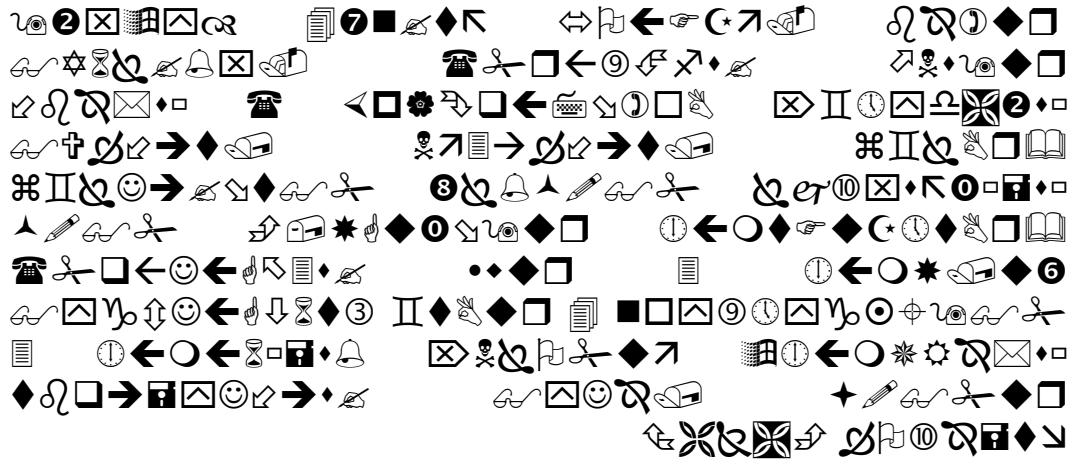


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis...”¹²

Pada awal ayat di atas telah diterangkan dengan jelas apabila kita sedang bermuamalah dan tidak melakukannya secara tunai dan dengan tenggang waktu, Allah telah menegaskan kepada umatnya untuk melakukan pencatatan dengan sebenar-

¹² Al-Baqarah (2) : 282

benarnya. Allah mempertegas pentingnya melakukan pencatatan seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 283:



Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang mempercayai itu menuanai amanatnya (utangannya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹³

Pencatatan di dalam dunia usaha disebut dengan akuntansi. Akuntansi dalam perbankan syariah merupakan salah satu alat yang diperlukan untuk mengukur kinerja dan laporan kepada pihak yang terkait. Akuntansi syariah adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Di Indonesia standar akuntansi yang berlaku untuk perbankan syariah adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK), dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). PAPSI yang sudah mendahului PSAK 102 tentang *murabahah* ini memberikan legitimasi bagi bank syariah untuk mengakui margin *murabahah* dengan metode anuitas dengan pendekatan PSAK

¹³ Al-Baqarah (2) : 283

50, 55, dan 60, dimana pendapatan dan biaya diamortisasi selama periode akad. Dalam landasan operasional, kedudukan PAPSI lebih tinggi jika dibandingkan dengan PSAK. Sehingga penulis memilih menggunakan PAPSI sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Penerbitan PAPSI diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. PAPSI 2013 mencakup penjelasan tentang laporan keuangan secara umum (mencakup kerangka dasar, komponen dan keterbatasan laporan keuangan). Untuk hal-hal yang tidak diatur atau dijelaskan dalam PAPSI dapat dilihat pada PSAK yang terkait. Pada PAPSI 2013 pada bagian ke IV terdapat penjelasan tentang *murabahah* yang penulis teliti dan dijadikan sebagai acuan.

Dari penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung dan apakah dalam penerapannya akuntansi *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung sesuai dengan PAPSI 2013.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung?
2. Apakah penerapan akuntansi *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung sesuai dengan PAPSI 2013?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung dengan PAPS I 2013.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi BPRS Bandar Lampung

Untuk mengetahui pencatatan akuntansi *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, untuk menganalisis apakah pencatatannya sesuai dengan PAPS I 2013, dan sebagai bahan masukan agar perlakuan akuntansi *murabahah* tetap sesuai dengan PAPS I 2013.

- b. Bagi Penulis

Sebagai hasil karya yang dijadikan bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang Perbankan Syariah. Dan menambah wawasan penulis tentang akuntansi yang dilakukan pada Perbankan Syariah.

- c. Bagi Pengembang Keilmuan

Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian yang lebih lanjut secara luas dan spesifik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁴ Penulis memilih penelitian kualitatif karena penelitian yang diperoleh berupa data yang selanjutnya dilakukan analisis, dan untuk memahami lebih mendalam mengenai perlakuan akuntansi *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung. Data yang diperoleh berupa fakta dan dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang hal yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fakta yang sedang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang menggambarkan bagaimana penerapan PAPSII 2013 pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BPRS Bandar Lampung.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Dan berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, PustakaBaru Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 19.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Kesepuluh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 26.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara penelitian dengan nara sumber.¹⁶ Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan manajer dan bagian keuangan yang ada di BPRS Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.¹⁷ Pengumpulan data sekunder dapat diperoleh dari laporan keuangan, buku pencatatan yang ada di BPRS Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.¹⁸ Wawancara ini dilakukan dengan bertanya jawab secara langsung kepada direktur, *accounting*, dan bagian keuangan yang ada di BPRS Bandar Lampung.

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit.*, hlm. 73.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 74.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 31.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, dan sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹⁹ Dokumentasi disini dimaksudkan untuk menghimpun data yang berupa dokumen BPRS secara umum. Adapun dokumen yang dihimpun meliputi: gambaran umum BPRS, struktur organisasi BPRS, laporan keuangan, buku pencatatan, dan dokumen lainnya yang mendukung kelengkapan data penelitian.

5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkann melalui beberapa tahapan di atas, peneliti di dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.²⁰ Reduksi data yang dimaksud adalah penulis meneliti kembali hasil penelitiannya apakah sudah memenuhi data yang diinginkan dan sesuai dengan masalah.
- b. *Data Display* (penyajian data) adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.²¹ Penulis melakukan penyajian dalam bentuk uraian singkat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 33.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 431.

²¹ *Ibid*, hlm. 434

c. *Conclusion Drawing / Verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²² Penulis membuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

6. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam menganalisa penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi khusus, artinya penelitian ini harus diawali dengan adanya sebuah teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada tersebut.²³ Penulis menggunakan PAPSI 2013 sebagai landasan teori yang sudah ada dan melakukan penelitian pada BPRS Bandar Lampung untuk dilakukan penelitian dengan penjelasan bahan analisis berupa: pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

²² *Ibid*, hlm. 438

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, hlm. 12

BAB II

LADASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁵ Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁶ BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.

²⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, hlm. 39.

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 62.

²⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 754.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana saja dengan badan hukum berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

2. Modal Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) modal yang disetor menurut PBI No. 6/17/PBI/2004 ditetapkan sekurang-kurangnya:²⁷

- a. Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan diwilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi.
- b. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah tersebut di atas, dan
- c. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah pada huruf a dan huruf b.

Menurut PBI No. 6/17/PBI/2004 Pasal 5, BPRS hanya dapat didirikan oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau dua pihak atau lebih dari pihak-pihak di atas.

Perubahan modal dasar bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas/ perusahaan daerah wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran

²⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi Pertama-Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 64.

dasar dari instansi berwenang disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

Menurut Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004, bentuk hukum suatu bank dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Pasal 3 menjelaskan, bahwa bank hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia dalam dua tahap: (a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank, dan (b) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip tersebut, pada bank Islam dan BPRS harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang cukup ketat, antara lain harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini:²⁸

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar.
- b. Data kepemilikan.
- c. Daftar calon anggota direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- d. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia.
- e. Rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama.
- f. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*).
- g. Pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan.
- h. Sistem dan prosedur kerja.

²⁸ *Ibid*, hlm. 66

- i. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari modal disetor.
- j. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa setoran modal tersebut:
 - 1) Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain.
 - 2) Tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari/dan/untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Menurut Pasal 7 PBI No. 6/24/PBI/2004, persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan:²⁹

- a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.
- b. Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antarbank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
- c. Wawancara terhadap calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris, dan calon anggota direksi.

²⁹ *Ibid*, hlm. 67

Selain itu, pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian bank.

Persetujuan prinsip ini berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan sebelum mendapat izin usaha. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Gubernur Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Pasal 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Gubernur bank Indonesia dan wajib disertai dengan:³⁰

- a. Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
- b. Data kepemilikan yang masing-masing disertai dengan dokumen yang telah diminta dalam hal terjadi perubahan.
- c. Daftar susuna direksi dan dewan komisaris, disertai dengan dokumen identitas dan dokumen dalam hal terjadi perubahan.
- d. Dokumen lainnya yang telah diajukan sebelumnya dalam hal terjadi perubahan.
- e. Bukti pelunasan modal disetor minimum;

³⁰ *Ibid*, hlm. 68

- f. Bukti kesiapan operasional; dan
- g. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank, bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari/dan/untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan:

- a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. Wawancara terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat pengganti atas calon yang diajukan sebelumnya.

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan bank belum melaksanakan kegiatan usaha, Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan. Bank yang telah

mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.³¹

3. Organisasi/Manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Organisasi / manajemen BPRS, meliputi:³²

- a. Dilihat dari segi kepemilikan BPRS dapat digolongkan dalam 3 golongan yakni:
 - 1) Milik Pemerintah Daerah (PD)
 - 2) Milik Swasta (PT)
 - 3) Milik Anggota Koperasi (Koperasi)
- b. Kepengurusan dilakukan oleh suatu dewan direksi atau pimpinan dengan diawasi oleh suatu dewan komisaris atau dewan pengawas atau badan pengawas atau badan pemeriksa, tergantung dari bentuk hukumnya.
 - 1) Bagi yang berbentuk PD, secara internal pengawasan terhadap direksi/pengurus bank dilakukan oleh dewan pengawas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Daerah.
 - 2) Bagi yang berbentuk hukum PT, secara internal pengawasan terhadap direksi/pengurus bank dilakukan oleh dewan komisaris yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham / anggaran dasar.
 - 3) Bagi yang berbentuk hukum operasi, secara internal pengawasan terhadap direksi/pengurus dilakukan oleh badan pemeriksa yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat anggota / anggaran dasar.

³¹ *Ibid*, hlm. 69

³² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Edisi Revisi-Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 136.

- c. Bagi anggota direksi / pimpinan suatu bank tidak diperkenankan merangkap suatu jabatan aktif di luar bank, dengan maksud agar direksi dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya semata-mata untuk kemajuan usaha banknya. Di samping itu, pimpinan bank harus bertempat tinggal di tempat dan atau yang berdekatan dengan tempat kedudukan bank.
- d. Untuk melindungi kepentingan para nasabah dan terlaksananya pengelolaan bank oleh direksi / pimpinan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku, maka dewan komisaris / dewan pengawas / badan pemeriksa dari setiap bank, wajib menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- e. Pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tahunan wajib dilakukan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan bank kepada para pemilik / pemegang saham / anggota.
- f. Untuk menjaga kepemilikan dan kepengurusan, ada pada orang-orang yang tepat dalam pengertian warga Negara RI dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemegang saham atau anggota, serta pimpinannya terdiri dari warga Negara Indonesia dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, maka:
 - 1) Setiap pengeluaran saham baru atau pemindahan saham wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
 - 2) Setiap pengangkatan pengurus bank harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

4. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar adalah sebagai berikut.³³

a. Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menip shadaqah, infak, zakat, mempersiapkan ongkos naik haji (ONH), merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan dan lain-lain.

1) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah (*trustee accaount*) berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Bank akan memberikan kadar *profit* dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

2) Tabungan *wadi'ah*

Bank menerima tabungan (*saving account*); bank pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini adalah *wadi'ah*, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, dan bank akan memberikan kadar *profit* kepada penabung yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

3) Deposito *wadi'ah* atau deposito *mudharabah*

³³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 45

Bank menerima deposito berjangka (*time and investment accaount*); baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerima deposito adalah *wadi'ah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana masyarakat berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositonya *wadi'ah* mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan/kredit nasabah yang dibayar setiap bulan.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungan dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

2) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, di mana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan di muka.

3) Pembiayaan *bai bitsaman ajil*

Pembiayaan *bai bitsaman ajil* adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

4) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo). *Murabahah* hampir sama dengan *bai bitsaman ajil* (BBA), bedanya adalah dalam hal pembayaran, pada akad *murabahah* dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

5) Pembiayaan *qardhul hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebijakan dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

Adapun sasaran pembiayaan BPRS adalah pengusaha kecil dan sector informal serta masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka waktu kredit meliputi: jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Agunan yang diutamakan pada

dasarnya adalah usaha atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.

c. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR dan lainnya. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan yang sifatnya bentuk talangan dana (*bridging financing*) yang didasarkan atas akan pembiayaan *bai salam*.

5. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Kegiatan Usaha

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:³⁴

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah; dan
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, *salam*, atau *istishna'*;

³⁴ Sutan Remy sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014 , hlm. 106.

- c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*; dan
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

b. Kegiatan yang Dilarang

Berdasarkan pasal 14 UU No. 7 Tahun 1992, kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPRS adalah:³⁵

- 1) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing.
- 3) Melakukan penyertaan modal.
- 4) Melakukan usaha perasuransian.

³⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Op. Cit*, hlm. 44

- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU No. 7 Tahun 1992.

c. Tujuan dan Strategi Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tujuan pendirian BPRS ini adalah untuk:³⁶

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan
- d. Mengurangi urbanisasi
- e. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut, diperlukan strategi usaha sebagai berikut:³⁷

- a. BPRS tidak bersifat menunggu(pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik
- b. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil
- c. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberikan pembiayaan.

³⁶ Rachmadi Usman, *Aspek Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 468

³⁷ *Ibid.*, hlm. 468

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.³⁸

Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), pengertian *murabahah* adalah “*al-bai bira ‘sil maal waribhun ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para *fuqaha* mensifati *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu’ al-amanah*). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.³⁹

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 108.

³⁹ *Ibid*, hlm. 109

dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁴⁰

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁴¹ Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.⁴² Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia: *Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴³

Menurut Sri Nurhayati & Wasilah, *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁴

⁴⁰ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Edisi 1-Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 145.

⁴¹ Rizal yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Edisi II, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 158.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 138

⁴³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Akademia Permata, Jakarta, 2012, hlm. 142.

⁴⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi III, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 174.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan (margin) yang diharapkan oleh bank serta disepakati oleh kedua belah pihak dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

- a. Fatwa MUI Tentang Pembiayaan *Murabahah* yang meliputi Enam Ketentuan:⁴⁶

Pertama : ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
- 3) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam

⁴⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 101.

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 64.

kaitan ini, Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan umum meliputi: pembiayaan *murabahah* yang dilakukan bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan, bank membiayai keseluruhan biaya atau sebagian, bank membeli barang dengan atas nama bank, semua hal yang berkaitan dengan transaksi di jelaskan secara rinci kepada nasabah, bank menjual barang kepada nasabah dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati dan nasabah membayarnya dengan perjanjian khusus untuk mempertegas nasabah terhadap pembiayaan yang akan dilakukan, dan bank bisa melakukan perwakilan untuk membeli barang dari pihak ketiga.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternative dari uang muka, maka
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, wajib melunasi kekurangannya.

Ketentuan *murabahah* kepada nasabah: nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian, jika permohonan pembiayaan disetujui maka dilakukan pembelian barang kemudian bank menawarkan asset tersebut kepada nasabah, bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah, jika nasabah menolak membeli barang maka nasabah harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan bank untuk uang muka.

Ketiga: jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Ketentuan tentang jaminan dalam transaksi *murabahah*: jaminan diperbolehkan dalam transaksi dan bank dapat meminta kepada nasabah untuk menyediakannya.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Ketentuan tentang utang dalam *murabahah*: jika terjadi utang dalam transaksi *murabahah* nasabah tetap berkewajiban melakukan penyelesaian utangnya dengan bank, baik nasabah menjual barang sebelum masa angsuran berakhir atau menjual barang yang menyebabkan kerugian.

Kelima: Penundaan Pembayaran dan *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Ketentuan penundaan pembayaran: nasabah yang mampu untuk membayar tetapi menundanya tidak dibenarkan, dan jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah (jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah).

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*

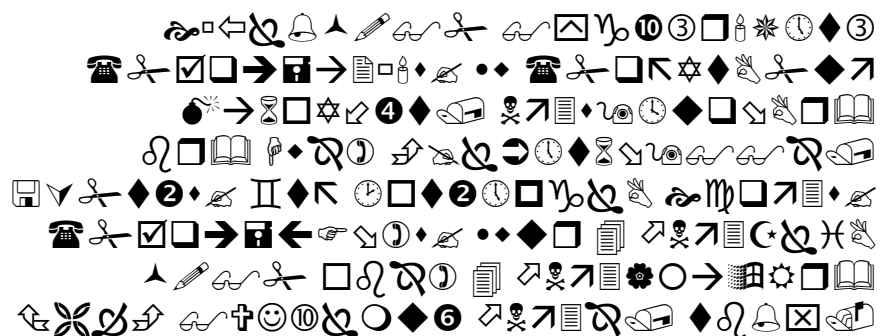
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ketentuan bangkrut: jika nasabah mengalami kegagalan dalam menyelesaikan utangnya, bank harus menunda pembayaran nasabah sampai nasabah tersebut sanggup atau berdasarkan kesepakatan.

b. Landasan Syariah

Berikut akan dijelaskan dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Kaidah Fiqih mengenai akad *murabahah*.

1) QS An-Nisa: 29



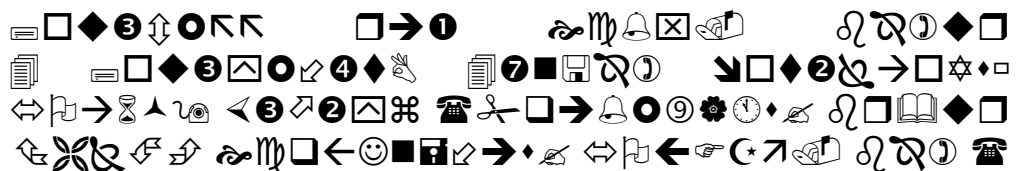
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁷

Maksud dari ayat di atas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram seperti riba, dan hendaklah memperoleh harta dengan cara perniagaan (perdagangan) yang berlaku berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka hal ini diperbolehkan dalam islam. Serta

⁴⁷ An-Nisa (4) : 29

Tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang menyebabkan kecelakaan (musibah) untuk memperolehnya, maka dilarang-Nya untuk berbuat demikian. Ayat di atas mengajarkan untuk melakukan transaksi dengan jalan perdagangan yang dihalalkan dan tidak melakukan riba.

2) QS Al-Baqarah: 280



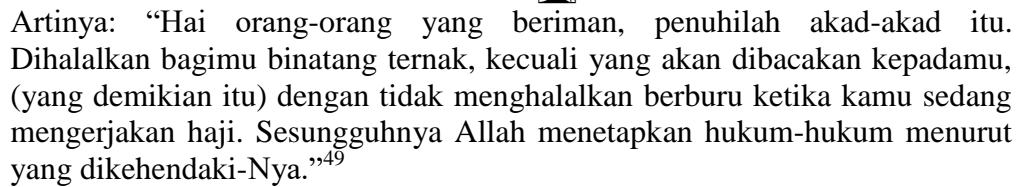
Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁴⁸

Maksud ayat di atas adalah jika kita memberikan utang kepada orang lain dan orang tersebut tidak mampu untuk membayarnya hendaklah kita memberikan tempo (waktu pembayaran) hingga dia sanggup untuk membayar utangnya, sebaliknya jika yang berhutang mampu untuk membayar, ia wajib untuk segera membayarnya dan tidak boleh menunda. Ayat di atas mengajarkan untuk memberikan keringan kepada yang berutang jika tidak mampu untuk membayarnya secara tunai.

3) QS Al-Maidah: 1



⁴⁸ Al-Baqarah (2) : 280



4) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli yang ditanggihkan, bagi hasil (*qiradh*), dan mencampur gandum dengan jelai

⁴⁹ Al-Ma'idah (5) : 1

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah dari Shuhayb)⁵⁰

Maksud dari hadis diatas adalah adalah terdapat tiga hal yang mengandung berkah yaitu melakukan jual-beli yang ditangguhkan dalam hal ini ditangguhkan pembayarannya seperti yang dijalankan dalam perbankan syariah misalnya transaksi *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (diangsur), bagi hasil (*qiradh*) juga dilakukan dalam perbankan syariah berupa kerjasama antara bank dengan nasabah untuk sebuah usaha dan keuntungannya dibagi dengan keduanya sesuai nisbah yang telah disepakati keduanya, dan mencampurkan gandum dengan jelai tidak untuk diperjual-belikan melainkan untuk keperluan rumah tangga, maksudnya tidak diperbolehkan untuk mencampurkan barang yang mirip untuk diperjual-belikan kecuali untuk konsumsi pribadi.

5) Hadis Nabi riwayat “Abd ar-Raziq dari Zayd bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW ditanya tentang ‘urbun (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”⁵¹

Maksud hadis di atas adalah jika dalam transaksi *murabahah* bank meminta untuk membayar uang muka hal itu diperbolehkan dan tidak harus perbankan syariah menetapkan uang muka dalam setiap transaksi yang dilakukan.

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Op.cit*, hlm. 62

⁵¹ *Ibid*, hlm. 63

6) Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵²

Maksud kaidah fiqh di atas adalah diperbolehkan melakukan transaksi (jual-beli) sepanjang dalam bermuamalah tersebut tidak terdapat dalil yang mengharamkannya atau tidak ada hukum yang melarangnya.

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

a. Rukun dan ketentuan Murabahah, yaitu:⁵³

1) Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizing walinya.

2) Objek Jual Beli, harus memenuhi:

a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah.

⁵² *Ibid*

⁵³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op.cit*, hlm. 179

- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kedaluarsa.
- c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

Misalnya: jual beli barang curian adalah tidak sah karena status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik harta. Contoh lain, jika seorang penjual telah menjual barangnya pada pembeli tertentu kemudian menjual kembali barang yang telah dijualnya pada pembeli lain yang mau membayar lebih tinggi, hal ini tidak diperbolehkan karena barang tersebut bukan lagi miliknya.

- d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- Misalnya, saya jual mobil avanza saya yang hilang dengan harga Rp. 40.000.000,- si pembeli berharap mobil itu akan ditemukan. Demikian juga jual beli atas barang yang sedang digadaikan atau telah diwakafkan.

- e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).

Misalnya, saya jual salah satu tanaman hias yang saya miliki., tidak jelas tanaman hias mana yang akan dijual, atau saya jual salah satu dari lima mobil yang saya miliki dengan harga Rp. 100.000.000,- tidak jelas mobil yangmana dan kondisinya bagaimana.

- f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.

Apabila suatu barang dapat diukur/ditakar/ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus diukur/ditakar/ditimbang terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (*gharar*).

- g) Harga barang tersebut jelas. Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada *gharar*.

Contoh: penjual berkata kepada pembeli, jika kamu membayar 1 bulan harganya Rp. 700.000,- tetapi jika kamu membayar 2 bulan maka harganya menjadi Rp. 750.000,- pembeli pun setuju, tanpa menyatakan harga yang mana yang dia setuju sehingga harga tidak menentu, kecuali dinyatakan harga yang mana yang disepakati. Begitu harga itu disepakati maka harga tersebut tidak boleh berubah.

- h) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).

Misalkan penjual dan pembeli bersepakat dalam transaksi jual beli beras tipe IR 65, dengan harga Rp. 5.000,-/kg sebanyak 1 ton, dan ketika melakukan kad berasnya masih ada di Cianjur. Hal ini dibolehkan dengan syarat apabila ternyata beras yang dikirim kualitasnya tidak sesuai, pembeli boleh memilih apakah akan tetap melakukan transaksi atau membatalkannya.

3) Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya.

Semua ketentuan syariah di atas tidak ada yang memberatkan. Semuanya masuk akal, memiliki nilai moral yang tinggi, menghargai hak kepemilikan harta, meniadakan persengketaan yang dapat berakibat pada permusuhan. Dengan kata lain, semua itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri.

b. Syarat *murabahah*:⁵⁴

1) Syarat orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- a) Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.

⁵⁴ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 60.

- b) Yang melakukan akad jual beli adalah orang berbeda.
- 2) Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:
 - a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
 - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan;
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 3) Syarat ijab dan Kabul, yaitu:
 - a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal,
 - b) Kabul sesuai dengan ijab,
 - c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis.

4. Jenis-jenis *Murabahah*

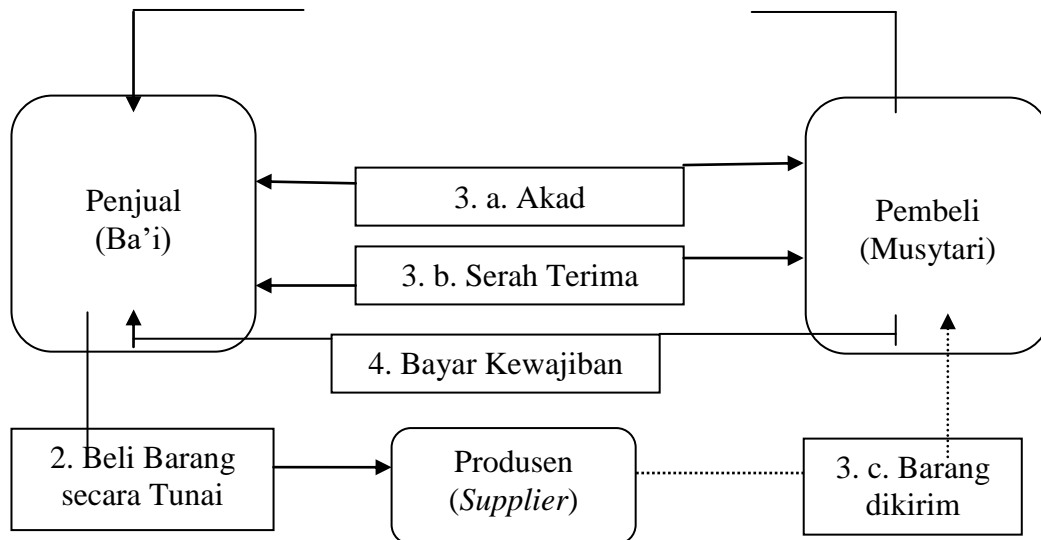
Berdasarkan jenisnya *murabahah* ada 2 macam, yaitu:⁵⁵

a. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah

⁵⁵ Kautsar Riza Salman. *On cit.* hlm. 145

memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.



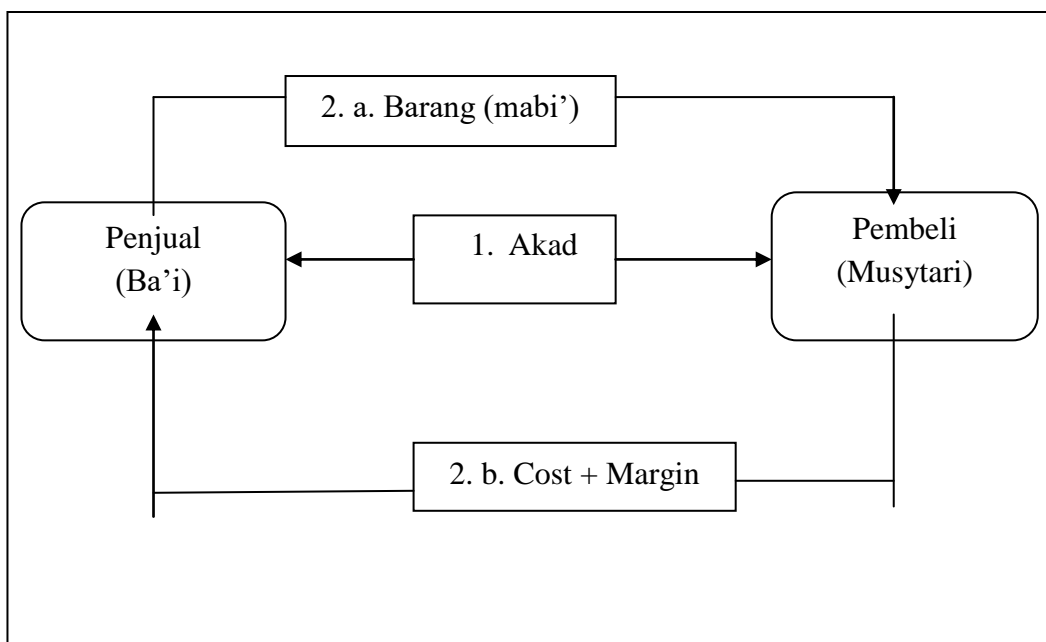
Gambar 1

Murabahah Berdasarkan Pesanan

b. *Murabahah Tanpa Pesanan*

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat.

Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.



5. Manfaat *Murabahah* dan Risiko *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi.

a. Manfaat *Murabahah*⁵⁶

Bai' al-murabahah member banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

b. Risiko *Murabahah*⁵⁷

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut

⁵⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, hlm. 106

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 107

akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- 4) Dijual; karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

6. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Perbankan

Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Perbankan, yaitu:⁵⁸

a. Penggunaan Akad *Murabahah*

- 1) Pembiayaan *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
- 2) Jenis penggunaan pembiayaan *Murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
- 3) Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

b. Barang yang Boleh Digunakan sebagai Objek Jual Beli

⁵⁸ Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 140

- 1) Rumah,
- 2) Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi,
- 3) Pembelian alat-alat industry,
- 4) Pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya,
- 5) Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

c. Bank

- 1) Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang.
Bila nasabah menunjuk *supplier* lain, maka bank berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank.
- 2) Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
- 3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening *supplier*/penjual, bukan kepada rekening nasabah.

d. Nasabah

- 1) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- 2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

e. Supplier

- 1) *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.

- 2) *Supplier* menjual barangnya kepada bank, kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
- 3) Dalam kondisi tertentu, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase Order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank.

f. Harga

- 1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank dan nasabah tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- 2) Harga jual bank merupakan harga jual yang disepakati antara bank dan nasabah.
- 3) Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

g. Jangka Waktu

- 1) Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank maupun nasabah.

h. Lain-lain

- 1) Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murabahah*. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang *murabahah*, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan nonhalal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang mampu, dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil.
- 2) Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama.

C. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Menurut PAPSI Bagian IV Tahun 2013

PAPSI 2013 merupakan acuan yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan diterbitkannya PAPSI 2013 diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan sehingga menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan.

PAPSI yang terdahulu perlu dilakukan penyesuaian karena di dalam PAPSI terdapat petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan. Dengan dilakukannya beberapa penyesuaian dalam PSAK oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), termasuk PSAK khusus tentang transaksi syariah, PSAK No. 50 (revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 (revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, serta PSAK NO. 48 (revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset maka diperlukan penyesuaian terhadap PAPSI 2003.

Di dalam PAPSI 2013 mencakup mengenai penjelasan tentang laporan keuangan secara umum (kerangka dasar, komponen dan keterbatasan laporan keuangan, serta metode pencatatan transaksi mata uang asing), keterterapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 serta pembahasan pengakuan pendapatan *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional serta penegasan mengenai perlakuan akuntansi pendapatan dan beban terkait langsung transaksi *murabahah*.

Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi *murabahah* pada prinsipnya harus dimiliki Bank sebelum akad *murabahah* disepakati. Cara memperoleh aset *murabahah* dapat dilakukan secara langsung oleh bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah. Dalam hal bank diwakilkan kepada pihak lain, pihak yang mewakili hanya

sebatas pada pencarian informasi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan bank.

Dalam praktiknya penyaluran pembiayaan *murabahah*, Bank sering kali menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi, dan beban lain yang terkait langsung dengan pembiayaan *murabahah* seperti beban komisi, beban survey, dan beban lain. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* tersebut diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah* secara proporsional sepanjang masa akad. Untuk lebih jelasnya mengenai perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* akan dibahas dengan meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan ilustrasi jurnal untuk mengolah data.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran PAPS 2013 meliputi:⁵⁹

a. Uang muka

- 1) Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka *Murabahah* dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.
- 2) Jika transaksi *Murabahah* dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang *Murabahah* (merupakan bagian pokok).
- 3) Jika transaksi *Murabahah* tidak dilaksanakan, maka:
 - a) Uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang

⁵⁹ Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Hlm. 4.7, <http://www.bi.go.id/>, akses 15 Oktober 2015

tersebut, apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada; atau

- b) Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada.

b. Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain

- 1) Sebelum akad *Murabahah* ditandatangani maka diskon harga beli tersebut diakui sebagai pengurangan harga perolehan asset *Murabahah*;

- 2) Setelah akad *Murabahah* ditandatangani dan;

- a) Diperjanjikan dalam akad, maka bagian diskon harga beli yang menjadi hak nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan bagian diskon yang menjadi hak Bank diakui sebagai tambahan keuntungan *Murabahah*.
- b) Tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.

c. Piutang *Murabahah* diakui pada saat akad transaksi *Murabahah*, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang *Murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.

d. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah*:

- 1) Metode Anuitas

- a) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui sebagai bagian dari piutang *Murabahah*, sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
- b) Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* sepanjang masa akad.

2) Metode Proporsional,

- a) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui secara terpisah dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
- b) Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengakuan pendapatan *Murabahah* sepanjang masa akad.

- e. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara tunai, maka pendapatan *Murabahah* diakui pada saat penyerahan asset *Murabahah* kepada nasabah.
- f. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara non – tunai, maka pengakuan pendapatan *Murabahah* diakui sebagai berikut:

1) Metode Anuitas

- a) Pendapatan *Murabahah* diakui sebesar saldo efektif *Murabahah* yang dikalikan dengan *effective rate*.
- b) Pendapatan *Murabahah* yang diakui tidak boleh melebihi piutang *Murabahah* yang disepakati dalam akad *Murabahah*.

2) Metode Proporsional

Pendapatan *Murabahah* diakui berdasarkan jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah secara proporsional berdasarkan porsi margin

Murabahah terhadap piutang *Murabahah* pada saat akad ditandatangani.

g. Potongan piutang *Murabahah*

- 1) Potongan pelunasan piutang *Murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah* pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
- 2) Jika potongan pembayaran cicilan piutang *Murabahah* diberikan kepada nasabah karena:
 - a) Membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah*; dan atau
 - b) Adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.

h. Denda (*ta'zir*) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.

2. Penyajian

Penyajian dalam PAPS I 2013, yaitu:⁶⁰

- a. Uang muka *Murabahah* dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya.
- b. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi *Murabahah* dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang *qardh*.
- c. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah* nasabah kepada Bank.

⁶⁰ 2013, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Hlm. 4.9, <http://bi.go.id/>, akses 15 Oktober 2015

- d. Margin *Murabahah* ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *Murabahah*.
- e. Beban potongan pelunasan / angsuran *Murabahah* sebagai pos lawan pendapatan margin *Murabahah*.
- f. Dalam hal Bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* yang belum diamortisasi, disajikan sebagai liabilitas lainnya dan asset lainnya.
- g. Pendapatan margin *Murabahah* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari asset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan margin *Murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
- h. Cadangan kerugian penurunan nilai *Murabahah* disajikan sebagai pos lawan (*contra accaount*) piutang *Murabahah*.
- i. Denda (*ta'zir*) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (*qardhul hasan*).

3. Pengungkapan

Pengungkapan dalam PAPS I 2013, yaitu: ⁶¹

- a. Rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sector ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai.
- b. Jumlah piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.

⁶¹ 2013, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Hlm. 4.14, <http://bi.go.id/>, akses 15 Oktober 2015

- c. Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, cadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah.
- d. Besarnya piutang *Murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.

4. Jurnal

Ilustrasi Jurnal dalam PAPS I 2013, yaitu: ⁶²

- a. Penerimaan uang muka dari nasabah
Db. Kas/rekening
Kr. Liabilitas lainnya – uang muka *Murabahah* dari pembeli
- b. Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
Db. Beban lain yang terkait
Kr. Kas/rekening
- c. Pada saat perolehan asset *Murabahah*
Db. Persediaan/asset *Murabahah*
Kr. Kas/rekening pemasok/kliring
- d. Pada saat penyaluran pembiayaan *Murabahah* kepada nasabah (pembayaran secara non-tunai):
 - 1) Metode Anuitas
 - a) Transaksi penjualan

⁶² 2013, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, hlm. 4.10, <http://bi.go.id/>, akses 15 Oktober 2015

Db. Piutang *Murabahah*

Kr. Margin *Murabahah* ditangguhkan

Kr. Persediaan/asset *Murabahah*

- b) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi

Murabahah

Db. Kas

Kr. Piutang *Murabahah* – pendapatan yang terkait langsung

- c) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi

Murabahah

Db. Piutang *Murabahah* – beban yang terkait langsung

Kr. Kas

- d) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang

Db. Liabilitas lainnya – uang muka *Murabahah* dari pembeli

Kr. Piutang *Murabahah* – porsi pokok

2) Metode Proporsional

- a) Transaksi penjualan

Db. Piutang *Murabahah*

Kr. Margin *Murabahah* ditangguhkan

Kr. Persediaan/asset *Murabahah*

- b) Pengakuan pendapatan yang terakit langsung dengan transaksi

Murabahah

Db. Kas

Kr. Liabilitas lainnya – Pendapatan yang ditangguhkan

- c) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi

Murabahah

Db. Asset lainnya – Beban yang ditangguhkan

Kr. Kas

- d) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang

Db. Liabilitas lainnya – uang muka *Murabahah* dari pembeli

Kr. Piutang *Murabahah* – porsi pokok

- e. Apabila pesanan nasabah dibatalkan

- 1) Uang muka lebih besar daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Liabilitas lainnya – uang muka *Murabahah* dari pembeli

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan

Kr. Beban lain yang terkait

Kr. Kas/rekening

- 2) Uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Liabilitas lainnya – uang muka *Murabahah* dari pembeli

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan

Kr. Beban lain yang terkait

- 3) Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db. Tagihan kepada nasabah

Db. Liabilitas lainnya – uang muka *Murabahah* dari pembeli

Kr. Kerugian penjualan barang pesanan

Kr. Beban lain yang terkait

f. Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akrual)

1) Metode Anuitas

Db. Pendapatan margin *Murabahah* yang akan diterima

Db/Kr. Piutang *Murabahah*

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*

2) Metode Proporsional

a) Pengakuan pendapatan margin *Murabahah*

Db. Pendapatan margin *Murabahah* yang akan diterima

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*

b) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi
Murabahah

Db. Liabilitas lainnya – Pendapatan yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan

c) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi
Murabahah

Db. Beban

Kr. Asset lainnya – Beban yang ditangguhkan

g. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)

1) Metode Anuitas

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Margin *Murabahah* yang ditangguhkan

Db/kr. Piutang *Murabahah*

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*

2) Metode Proporsional

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Margin *Murabahah* yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*

h. Pemberian potongan angsuran piutang *Murabahah*:

1) Angsuran tepat waktu

a) Pada saat penerimaan angsuran:

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Margin *Murabahah* ditangguhkan (jika masih ada)

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*

b) Pada saat pemberian potongan angsuran

Db. Beban potongan angsuran *Murabahah*

Kr. Kas/rekening nasabah

2) Penurunan kemampuan pembayaran

a) Pada saat penerimaan angsuran

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Margin *Murabahah* ditangguhkan (jika masih ada)

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*

b) Pada saat pemberian potongan angsuran

Db. Beban operasional

Kr. Kas/rekening nasabah

i. Pemberian potongan pelunasan dini:

1) Jika pada saat penyelesaian Bank mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*:

a) Pada saat pemberian potongan pelunasan:

Db. Beban potongan angsuran *Murabahah*

Kr. Piutang *Murabahah*

b) Pada saat penerimaan pelunasan:

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Margin *Murabahah* ditangguhkan (jika masih ada)

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*

2) Jika setelah penyelesaian, Bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *Murabahah* dari nasabah, Bank membayar potongan pelunasan dini *Murabahah* kepada nasabah dengan mengurangi pendapatan *Murabahah*:

a) Pada saat penerimaan pelunasan:

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Margin *Murabahah* ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *Murabahah*

b) Pada saat member potongan pelunasan

Db. Beban potongan pelunasan

Kr. Kas/rekening nasabah

j. Pada saat penyelesaian piutang *Murabahah* melalui eksekusi agunan

1) Pada saat eksekusi agunan

Db. Asset yang diambil alih

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Margin *Murabahah* yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan yang ditangguhkan

2) Pada saat penjualan agunana

a) Apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah

Db. Kas/rekening

Kr. Asset yang diambil alih

Kr. Rekening nasabah

Db. Pendapatan yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan *Murabahah*

b) Apabila hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban nasabah

Db. Kas/rekening

Db. Tagihan kepada nasabah

Kr. Asset yang diambil alih

Db. Pendapatan yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan *Murabahah*

k. Penerimaan denda dari nasabah

Db. Kas/rekening

Kr. Rekening dana kebajikan

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Analisis Kesimpulan
1	Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PAPSİ pada Akuntansi Pembiayaan di	Faridah, Inayah Adi Sari, Bening	Perlakuan Berdasarkan PSAK 59 dan PAPSİ telah dilakukan oleh BMT

	BMT Ma'Unah Tegal	Wuryandari	Ma'unah.
2	Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada BPRS xxx di Kota Mojokerto)	Kiki Priscilia Ramadhani	Informasi yang diterima oleh pihak nasabah tidak sempurna dan melanggar prinsip <i>An-Tarradin Minkum, Al-Amanah</i> iB yang ada di BPRS xxx tidak sesuai dengan <i>murabahah</i> KPP, <i>murabahah al-amanah</i> iB yang ada di BPRS bisa dikatakan tidak sah, survey yang terjadi tidak akurat.
3	Analisis Pelaksanaan Akuntansi <i>Murabahah</i> pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang	Novan Bastian Dwi Ardha	BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad <i>wakalah</i> dan <i>murabahah</i> menjadi satu <i>ijab qabul</i> atau kesepakatan, BRI Syariah Cabang Kota Malang menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan <i>murabahah</i> , BRI Syariah Cabang Kota Malang pada pelaporan akuntansi tahun 2012 melanggar PSAK 102 Tahun 2007 untuk aktifitas akad <i>murabahah</i> , melainkan sudah menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK 102 Revisi 2013 meski peraturan ini belum diterbitkan.
4	Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 59 dan PAPS Di PTAI	Wadhan	akuntansi <i>syari'ah</i> adalah akuntansi yang berorientasi sosial, prinsip-prinsip umum akuntansi <i>syari'ah</i> yang menjadi dasar universal dalam operasional akuntansi <i>syari'ah</i> , yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, operasional bank <i>syari'ah</i> terdiri dari dua aktivitas utama yaitu kegiatan penghimpunan dana atau pendanaan (<i>funding</i>) dan kegiatan pembiayaan (<i>financial</i>).
5	Penerapan Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan <i>Murabahah</i> (At Tamwil Bi Al Murabahah) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013	Nurul Istikoma	Bank Umum Syariah di Indonesia menerapkan pengakuan keuntungan <i>murabahah</i> yang berbeda, Pengakuan keuntungan transaksi <i>murabahah</i> dengan pembayaran ditangguhkan atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut dengan menggunakan metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu akad diterapkan,

			<p>Ada tiga bank umum syariah yang menerapkan dua metode pengakuan keuntungan</p> <p>sekaligus, yaitu: Bank Syariah Mega Indonesia, PT. BCA Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Umum Syariah masih melakukan menerapkan PSAK 102 tahun 2007 atau PSAK 55.</p>
--	--	--	---

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung

BPRS Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh Pemerintah Kota Bandar terhadap BPRS Sakai Sambayan yaitu Bank Syariah pertama di Propinsi Lampung yang beroperasi sejak tahun 1996 yang didirikan atas prakarsa Bapak Poedjono Pranyoto Gubernur Lampung saat itu, bersama para pejabat teras dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, ICMI Lampung dan MUI Provinsi Lampung dengan Modal Dasar saat itu sebesar Rp. 500 juta yang beralamat di Kecamatan Natar – Lampung Selatan.

Sejak berdiri pada tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami pasang surut dan pada tahun 2006 bank tersebut mulai mengalami masalah hingga penurunan kinerja yang dikarenakan banyaknya pembiayaan bermasalah (NPF) dan manajemen pengelolaan bank yang tidak professional. Sejak itulah bank mengalami masalah yang cukup besar yaitu mulai dari kekurangan kecukupan modal (CAR) dan kesulitan likuiditas yang berakibat bank ini menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus oleh Bank Indonesia.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai rencana untuk mendirikan BPR Syariah (Bank Syariah) dengan membentuk Tim Pendirian Bank Syariah yang bekerjasama dengan Konsultan dari Fakultas Ekonomi Unila dalam melakukan Kajian tentang Kelayakan Pendirian Bank Syariah Kota Bandar Lampung. Dari hasil kajian tersebut dinyatakan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung sudah layak untuk mendirikan BPR Syariah.

Adapun kesimpulan dari hasil kajian tentang kelayakan pendirian bank syariah merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dikonversi menjadi Bank Pasar Syariah.
- b. Menambah divisi Syariah pada Bank Pasar Kota Bandar Lampung, atau
- c. Mendirikan bank baru yaitu Bank Pasar Syariah Bandar Lampung.

Setelah melalui beberapa tahapan proses tentang pendirian Bank Syariah maka selanjutnya rencana pendirian bank syariah tersebut direalisasikan dengan cara akuisisi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp. 2.957.000.000,-.

Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung di BPRS Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bambang Abiyono, SH No. 20 tanggal 5 Desember 2008 tentang Akuisisi dan Akta Notaris Bambang Abiyono, SH Nomor 21 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan yang telah mendapat pengesahan Menkum dan Ham RI pada tanggal 04 Nopember 2009. Maka dengan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 2.957.000.000,- dari total modal setor seluruh pemegang saham BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp. 5.000.000.000,- dihasilkan nilai saham milik Pemda Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp. 3.978.500.000,- atau 79,57%.

Pada keputusan RUPS Luar Biasa tersebut diatas juga disetujui antara lain:

- a. Menambah modal dasar Perseroan dari Rp. Milyar menjadi Rp. 10 Milyar.
- b. Mengganti nama BPRS sakai Sambayan menjadi BPRS Bandar Lampung.
- c. Melakukan Relokasi kantor dari Kecamatan Natar Lampung Selatan ke wilayah Bandar Lampung.
- d. Melakukan Reorganisasi Pengurus Perseroan.

Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 22 Desember 2010 ditetapkan hari berdirinya PT BPRS Bandar Lampung.

Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya BPR dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas

muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat di kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.⁶³

2. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung

a. Profil Perusahaan⁶⁴

Nama Perusahaan	: BPR Syariah Bandar Lampung
Tanggal Berdiri	: 22 Desember 2008
Pemilik Saham	: Pemda Kota Bandar Lampung 87,98%
	Pemilik Saham lainnya 12,02%
Alamat	: Jl. Pangeran Antasari No.148, Bandar Lampung
Nama sebelum	: PT. BPR Syariah Sakai Sambayan PNM
Alamat sebelumnya	: Jl. Raya Natar No.1, Muara Putih, Natar Lampung selatan
Pegawai	: Kepala Bagian : 2 Orang
	Staf : 17 Orang

b. Kepengurusan

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 468/23/HK/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung yang telah dilakukan Fit and Proper Test oleh Bank Indonesia dengan Surat Bank Indonesia No. 10/31/DPbS/Bdl tanggal 04 Nopember 2008

⁶³ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *Profil Bank*

⁶⁴ Ridwansyah, *Selayang Pandang Bank Syariah Bandar Lampung Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, 2015

perihal Hasil Fit and Proper Test, maka Susunan Pengurus Perseroan BPRS Bandar Lampung periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Komisaris Utama : A. Rahman Mustafa, S.E., MM, Ak
Komisaris Anggota : Yusran Effendi, S.E., MM.
- 2) Dewan Pengawas Syariah : Ismail Saleh, S.Hi.
Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag
- 3) Direksi
Direktur Utama : Ridwansyah, S.E., M.E. Sy.
Direktur : Marsono, S.E.

c. Perizinan

Perizinan pada BPRS Bandar Lampung yaitu:⁶⁶

- 1) Persetujuan Prinsip Departemen Keuangan RI, No. S-1269/MK.17/1994 Tanggal 29 Agustus 1994
- 2) Izin Usaha Menteri Keuangan RI, No. Kep-013/MK.17/1996 Tanggal 08 Januari 1996
- 3) Izin Usaha Bank Indonesia, No. 28/205/UPBR/Bdl Tanggal 13 Pebruari 1996
- 4) Persetujuan Akuisisi Bank Indonesia, No. 10/16/DPbs/Bdl Tanggal 18 Pebruari 2008

d. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung adalah melayani masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah serta melayani jasa lainnya yang dimungkinkan berdasarkan prinsip syariah.⁶⁷

⁶⁵ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *Ibid*

⁶⁶ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *Ibid*

⁶⁷ Ridwansyah, Ridwansyah, Selayang Pandang Bank Syariah Bandar Lampung Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 2016

3. Visi, Misi, dan Motto BPRS Bandar Lampung

BPRS Bandar Lampung mempunyai Visi, Misi, dan Motto, sebagai berikut:⁶⁸

a. Visi

“Menjadi BPR Syariah terbaik untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan di Provinsi Lampung”

b. Misi

- 1) Senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia untuk mencapai pelayanan yang lebih baik dan handal.
- 2) Mendukung Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan turut mendukung pembangunan di Provinsi Lampung melalui pelayanan sector perbankan Syariah.
- 3) Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat berbasis Keuangan Syariah.
- 4) Membina kader-kader wirausahawan yang berorientasi syariah hingga menjadi *bankable* dan mandiri.
- 5) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

c. Motto

“Berdasar Syariah, Insya Allah lebih Barokah”

4. Produk-produk BPRS Bandar Lampung

Dalam kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung melayani masyarakat dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu:⁶⁹

a. Simpanan

⁶⁸ Ridwansyah, *Ibid*

⁶⁹ Ridwansyah, *Ibid*

Jenis simpanan terdiri dari:

- 1) Tabungan Syariah Titipan
- 2) Tabungan Syariah Umum
- 3) Tabungan Pelajar
- 4) Tabungan Sikencana
- 5) Tabungan Haji
- 6) Tabungan Qurban
- 7) Deposito Berjangka Syariah

b. Pembiayaan

1) Produk Pembiayaan berdasarkan akad:

- a) Pembiayaan jual beli (Al-Murabahah)
- b) Pembiayaan bagi hasil (Al-Mudharabah)
- c) Pembiayaan penyertaan modal (Al-Musarakah)
- d) Pembiayaan untuk sewa manfaat (Ijarah Multijasa)
- e) Pembiayaan Kebajikan (Al-Qardh)

2) Produk pembiayaan berdasarkan penggunaan:

- a) Modal kerja (Al-Murabahah, Al-Mudharabah)
- b) Investasi (Al-Murabahah)
- c) Konsumtif (Al-Murabahah, Al-Ijarah, Al-Qardh)

3) Produk pembiayaan berdasarkan sasaran penyaluran:

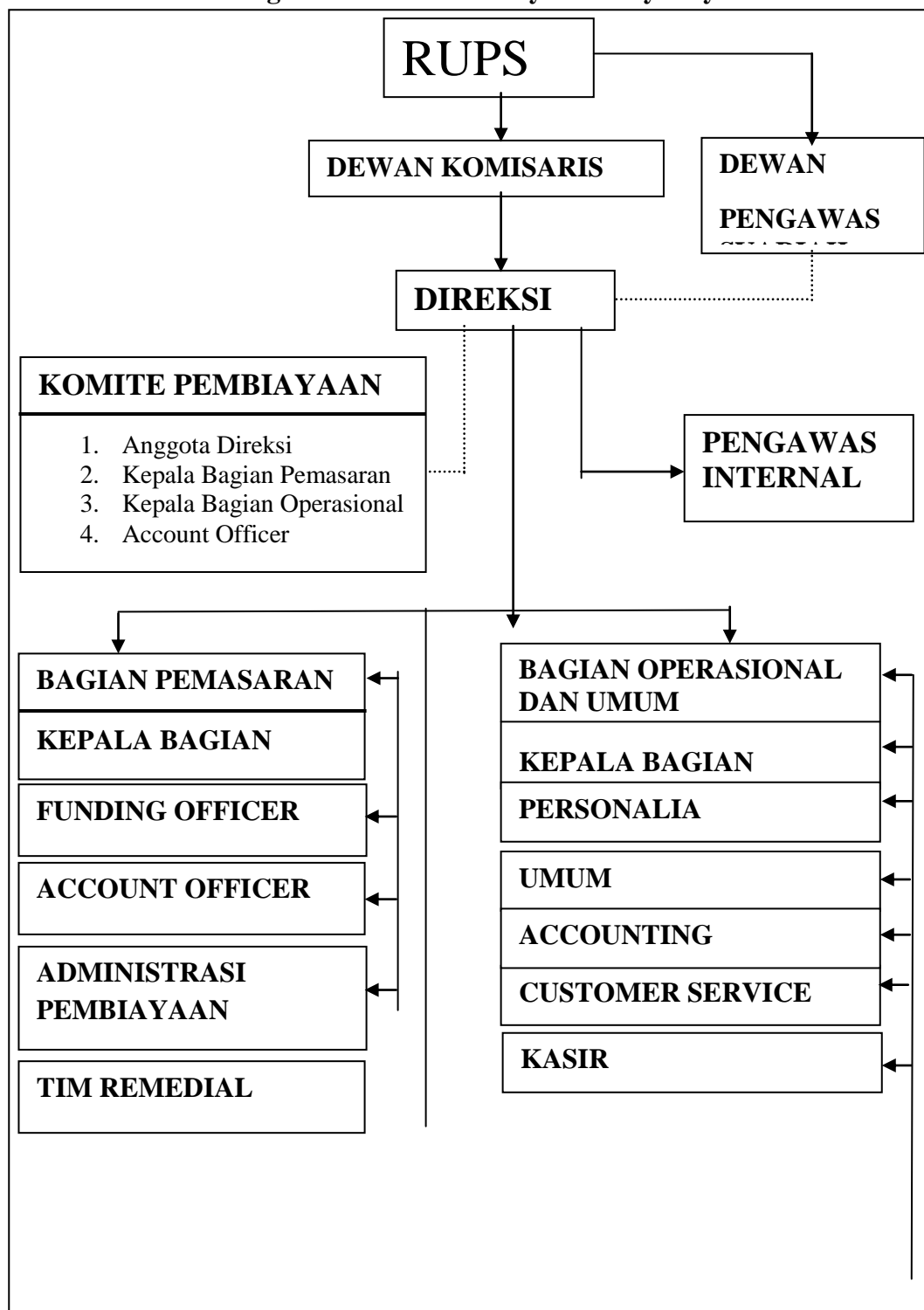
- a) Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Mikro (UKM)
- b) Pembiayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- c) Pembiayaan Pegawai BUMN dan BUMD
- d) Pembiayaan Pegawai Perusahaan Instansi / Swasta
- e) Pembiayaan Kebajikan (Al-Qardh)

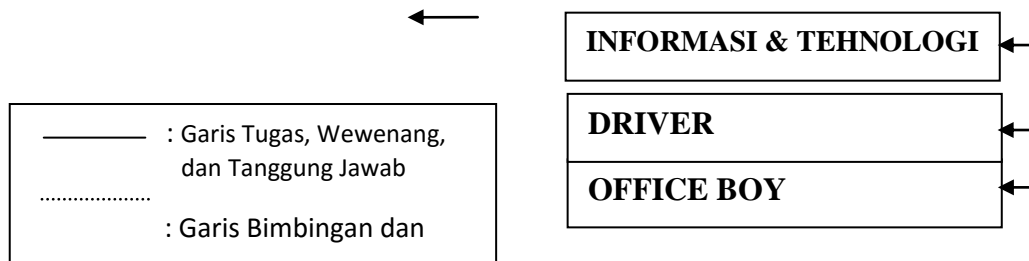
c. Jasa Lainnya:

Produk jasa lainnya:

- 1) Jasa transfer dana antar bank
- 2) Fasilitas penjualan pulsa, dan
- 3) Jasa pembayaran rekening listrik

5. Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung





Gambar 3

Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung

Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung:⁷⁰

Dewan Komisaris	: H.A. Rahman Mustafa, S.E., M.M.Ak. H. Yusran Effendi, S.E., M.M.
Dewan Pengawas Syariah	: Ismail Saleh, SHI Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.
Direksi	: Dirut : Ridwansyah, S.E., M.E.Sy Direktur : Marsono, S.E.
Pengawasan Internal	: Syaripudin Taib, S.E.
Bagian Pemasaran	
1. Funding Officer	: Zuli Akhmaliah
2. Account Officer	: Septi Mastaliza, S.E. Berlian Feni A
3. Adm. Pembiayaan	: Siti Suryati, A.Md Dede Ali Ma'rifat, S.Kom
4. Tim Remedial	: A. Ferdiansyah, S.E. Akhmad Ikbali Juni Azwan, S.E
Bagian Operasional dan Umum	
1. Kepala Bagian	: Roslina

⁷⁰ Ridwansyah, *Ibid*

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 2. Pesonalia | : Andi Irawan, S.E. |
| 3. Umum | : Wahyu Atmojo |
| 4. Accounting | : Jumhuri, S.E. |
| 5. Customer Service | : Siti |
| 6. Informasi Teknologi | : Adi |
| 7. Kasir | : Misna Warita |
| 8. Driver | : Sukarna |
| 9. Office Boy | : Aldian Kholil Prasetya |

B. Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung

Pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Bandar Lampung) digunakan oleh pegawai, baik Pegawai Negeri maupun Pegawai Swasta dan juga oleh UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Pembiayaan yang dilakukan untuk keperluan diantaranya: pembiayaan modal kerja, membeli rumah, renovasi rumah, pembelian kendaraan baik baru maupun tukar tambah, membeli perabotan rumah tangga, membeli tanah, dan sebagainya. Sampai dengan Desember 2015 jumlah pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung sejumlah Rp. 16.382.620.550 dengan jumlah nasabah sebesar 1029 nasabah.⁷¹

Adapun alur atau prosedur untuk pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:⁷²

1. Mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* yang didalamnya diketahui penggunaannya untuk membeli barang-barang berwujud.
2. Dianalisa oleh bagian pembiayaan dengan menggunakan pendekatan 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy)
3. Bila yang mengajukan pembiayaan bukan dari kalangan pegawai, yaitu dilakukan observasi atau survey lapangan terlebih dahulu.

⁷¹ Wawancara dengan Marsono, Direktur BPRS Bandar Lampung, tanggal 18 Februari 2016

⁷² Wawancara dengan Marsono, Direktur BPRS Bandar Lampung, tanggal 18 Februari 2016

4. Dari hasil analisa tersebut lalu petugas pembiayaan atau *Account Officer* (AO) menyampaikan usulan layak atau tidak layak untuk diberikan pembiayaan dan untuk mendapat rekomendasi di kepala bagian marketing hingga direksi.
5. Apabila hasil pengajuan pembiayaan ditolak maka pihak bank akan memberitahukan kepada calon nasabah bahwa permohonan pembiayaan tidak disetujui, dan jika permohonan disetujui maka proses dilanjutkan kepada administrasi pembiayaan untuk dipersiapkan akadnya.
6. Setelah akad beserta dokumen pendukung dianggap lengkap maka dilanjutkan realisasi pembiayaan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Penandatanganan akad dan dokumen pendukung lain.
 - b. Menandatangani warkat (nota) keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan nasabah pada kasir.
 - c. Pencairan dana yang dilakukan di kasir setelah proses penandatanganan pada administrasi terpenuhi, sebelum penerimaan dana nasabah wajib menandatangani warkat (nota) tersebut pada kolom penerimaan dana.
 - d. Nasabah menerima dana sari kasir disertai dengan wakalah atau kuasa untuk penggunaan dana berikut dengan jadwal angsuran sebagai acuan atau monitoring pembayaran angsuran pada setiap bulannya.
7. Setelah penerimaan dana dan nasabah membelanjakannya lalu nasabah diwajibkan ke bank untuk menyetorkan bukti pembelian dengan jangka waktu penyerahan paling lama satu bulan.

Adapun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon adalah, sebaga berikut:⁷³

1. Syarat dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh pegawai:

⁷³ Wawancara dengan Marsono, Direktur BPRS Bandar Lampung, tanggal 18 Februari 2016

- a. Permohonan pembiayaan yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui ahli waris terdekat (suami atau istri).
 - b. Direkomendasikan oleh bendahara dan kepala instansi tempat pemohon bekerja, dan dilengkapi dengan:
 - 1) Surat kuasa pemotongan gaji
 - 2) Kesanggupan bendahara untuk membayarkan setiap bulannya
 - 3) Surat pernyataan ahli waris terdekat (suami atau istri)
 - 4) Surat gaji/penghasilan
 - 5) Daftar nama barang atau jenis penggunaan dana pembiayaan
 - 6) Laporan pembinaan nasabah
 - 7) Fotocopy pemohon
 - 8) Fotocopy ahli waris terdekat (suami atau istri)
 - 9) Dokumen-dokumen jaminan berupa SK yang diperlukan
 - c. BI Checking yang bersifat rahasia untuk mengetahui bahwa nasabah tersebut adalah tidak ada pembiayaan di bank lain dan kondisi pembiayaan nasabah.
 - d. Momerandum usulan pembiayaan
 - e. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)
 - f. Perjanjian atau akad pembiayaan
 - g. Wakalah atau surat kuasa
 - h. Jadwal angsuran
2. Syarat dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh pegawai:
- a. Permohonan pembiayaan yang ditandatangani pemohon dan ahli waris terdekat (suami atau istri)

- b. Lampiran-lampiran berupa dokumen:
- 1) Surat Keterangan Usaha dari kelurahan terdekat atau SITU,SIUP, TDP jika ada
 - 2) Fotocopy KTP Pemohon
 - 3) Fotocopy ahli waris terdekat (suami atau istri)
 - 4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - 5) Fotocopy surat nikah
 - 6) Pas foto
 - 7) Fotocopy dokumen jaminan yang akan diserahkan dan aslinya diserahkan pada saat pencairan bila disetujui
- c. BI Checking yang bersifat rahasia untuk mengetahui bahwa nasabah tersebut adalah tidak ada pembiayaan di bank lain dan kondisi pembiayaan nasabah
- d. Momerandum usulan pembiayaan
- e. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)
- f. Perjanjian atau akad pembiayaan
- g. Wakalah atau surat kuasa
- h. Jadwal angsuran
- i. Surat kuasa menjual barang jaminan (kuasa jual)
- j. Surat pernyataan pengosongan barang jaminan apabila berbentuk tanah dan bangunan
- k. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bila ada.

C. Data Yang Diperoleh Dari BPRS Bandar Lampung

Hasil penelitian yang dilakukan pada BPRS Bandar Lampung berupa Laporan keuangan dan keterangan lainnya yang diperoleh melalui wawancara. Berikut rincian data yang diperoleh dari BPRS Bandar Lampung:

1. Form pembiayaan *murabahah* lengkap, dapat dilihat pada lampiran.
2. Jumlah piutang *murabahah* yang tercantum di dalam Laporan Neraca, dapat dilihat pada lampiran.
3. Pendapatan margin *murabahah* yang akan diterima berdasarkan golongan *performing* disajikan dalam Neraca dan berdasarkan golongan non- *performing* disajikan di dalam Laporan Komitmen dan Kontijensi, dapat dilihat pada lampiran.
4. Rincian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif berdasarkan kolektibilitas disajikan di dalam Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya, dapat dilihat pada lampiran.
5. Besarnya Denda yang tercantum di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan, dapat dilihat pada lampiran.
6. Rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah dan kualitas piutang, dapat dilihat pada lampiran.
7. Rincian piutang *murabahah* berdasarkan jangka waktu, dapat dilihat pada lampiran.
8. Rincian piutang *murabahah* berdasarkan jenis penggunaan, dapat dilihat pada lampiran.
9. Rincian piutang *murabahah* berdasarkan sektor ekonomi, dapat dilihat pada lampiran.
10. Wawancara yang dilakukan dengan Jumhuri sebagai *accounting* pada tanggal 16 Februari 2016, Dede Ali Ma'rifat sebagai Admin Pembiayaan pada tanggal

16 Februari 2016, Marsono sebagai Direktur pada tanggal 18 Februari 2016, Roslina sebagai Kepala Bagian BPRS dan Umum pada tanggal 23 Februari 2016. Panduan wawancara terdapat pada lampiran.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Bandar

Lampung

Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi *murabahah* pada prinsipnya harus dimiliki Bank sebelum akad *murabahah* disepakati. Cara memperoleh aset *murabahah* dapat dilakukan secara langsung oleh bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah. Dalam hal bank diwakilkan kepada pihak lain, pihak yang mewakili hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan bank.

Dalam praktiknya penyaluran pembiayaan *murabahah*, Bank sering kali menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi, dan beban lain yang terkait langsung dengan pembiayaan *murabahah* seperti beban komisi, beban survey, dan beban lain. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* tersebut diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah* secara proporsional sepanjang masa akad.

5. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran PAPS 2013 meliputi:

b. Uang muka

- 4) Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka *Murabahah* dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.
- 5) Jika transaksi *Murabahah* dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang *Murabahah* (merupakan bagian pokok).
- 6) Jika transaksi *Murabahah* tidak dilaksanakan, maka:
 - b) Uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban

riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada; atau

- c) Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada.

Pada BPRS Bandar Lampung tidak ada uang muka sehingga tidak ada jurnal pengakuan dan pengukuran.

i. Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain

- 3) Sebelum akad *Murabahah* ditandatangani maka diskon harga beli tersebut diakui sebagai pengurangan harga perolehan asset *Murabahah*;

- 4) Setelah akad *Murabahah* ditandatangani dan;

- c) Diperjanjikan dalam akad, maka bagian diskon harga beli yang menjadi hak nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan bagian diskon yang menjadi hak Bank diakui sebagai tambahan keuntungan *Murabahah*.

- d) Tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.

Pada BPRS Bandar Lampung tidak ada diskon sehingga tidak ada jurnal pengakuan dan pengukuran.

- j. Piutang *Murabahah* diakui pada saat akad transaksi *Murabahah*, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang *Murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.

Kasus yang terjadi di BPRS Bandar Lampung, pada tanggal 8 Agustus 2014 Pak Ali datang ke BPRS Bandar Lampung untuk melakukan pembiayaan *murabahah* membeli bahan baku untuk merenovasi rumah, dan pada tanggal tersebut juga Pak Ali menandatangani akad *murabahah* beserta *wakalah* untuk pembelian barang yang di akadkan, dengan perincian:

Harga barang	8.000.000
Margin	960.000
Jangka Waktu	24 bulan
Biaya Administrasi	80.000 (1% dari pembiayaan)
Biaya Asuransi	55.000
Biaya Biaya Provisi	40.000

Dengan biaya angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 373.333,- dan terdapat dalam tabel 3. Berikut rincian angsuran pembiayaan *murabahah*:

Tabel 3

Rincian Angsuran pembiayaan *murabahah*

Angsuran	Bulan & Tahun	Jumlah Angsuran	Outstanding
			8.960.000
1	08 Agustus 2014	373.333	8.586.667
2	08 September 2014	373.333	8.213.334
3	08 Oktober 2014	373.333	7.840.001
4	08 November 2014	373.333	7.466.668
5	08 Desember 2014	373.333	7.093.335
6	08 Januari 2015	373.333	6.720.002
7	08 Februari 2015	373.333	6.346.669
8	08 Maret 2015	373.333	5.973.336
9	08 April 2015	373.333	5.600.003
10	08 Mei 2015	373.333	5.226.670
11	08 Juni 2015	373.333	4.853.337
12	08 Juli 2015	373.333	4.480.004

13	08 Agustus 2015	373.333	4.106.671
14	08 September 2015	373.333	3.733.338
15	08 Oktober 2015	373.333	3.360.005
16	08 November 2015	373.333	2.986.672
17	08 Desember 2015	373.333	2.613.339
18	08 Januari 2016	373.333	2.240.006
19	08 Februari 2016	373.333	1.866.673
20	08 Maret 2016	373.333	1.493.340
21	08 April 2016	373.333	1.120.007
22	08 Mei 2016	373.333	746.674
23	08 Juni 2016	373.333	373.341
24	08 Juli 2016	373.333	0
Total		8.960.000	

Sumber: BPRS Bandar Lampung

Piutang Murabahah diakui pada saat akad transaksi *Murabahah* Kasus pada tanggal 8 Agustus 2014, terjadi Pengakuan dan Pengukuran:

Pada saat transaksi penjualan

Db Piutang murabahah 8.960.000

Kr Kas/Tabungan nasabah 8.000.000

Kr Margin yang ditangguhkan 960.000

k. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah*:

1) Metode Anuitas

c) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi

Murabahah diakui sebagai bagian dari piutang *Murabahah*, sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.

- d) Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* sepanjang masa akad.

2) Metode Proporsional,

- c) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui secara terpisah dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
- d) Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengakuan pendapatan *Murabahah* sepanjang masa akad.

Pada BPRS Bandar Lampung menggunakan metode anuitas sehingga:

Transaksi penjualan

Db Piutang murabahah	8.960.000
Kr Kas/Tabungan nasabah	8.000.000
Kr Margin yang ditangguhkan	960.000

Biaya-biaya yang ditanggung nasabah

Db Kas/Tabungan nasabah	174.000
Kr Biaya Administrasi	80.000
Kr Biaya Asuransi	55.000
Kr Biaya Provisi	40.000

Dengan demikian biaya administrasi yang diamortisasi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.333,- dan terdapat dalam tabel 4. Berikut rincian biaya administrasi yang diamortisasi sepanjang masa akad, yaitu:

Tabel 4

Rincian Biaya Administrasi yang Diamortisasi

No	Tanggal Pencairan dan Pengakuan	Pengakuan Biaya Administrasi	Sisa Biaya Adm yang Belum Diakui
1	08/08/2014		Rp. 80,000
2	08/09/2014	Rp. 3,333	Rp. 76,667
3	08/10/2014	Rp. 3,333	Rp. 73,334
4	08/11/2014	Rp. 3,333	Rp. 70,001
5	08/12/2014	Rp. 3,333	Rp. 66,668
6	08/01/2015	Rp. 3,333	Rp. 63,335
7	08/02/2015	Rp. 3,333	Rp. 60,002
8	08/03/2015	Rp. 3,333	Rp. 56,669
9	08/04/2015	Rp. 3,333	Rp. 53,336
10	08/05/2015	Rp. 3,333	Rp. 50,003
11	08/06/2015	Rp. 3,333	Rp. 46,670
12	08/07/2015	Rp. 3,333	Rp. 43,337
13	08/08/2015	Rp. 3,333	Rp. 40,004
14	08/09/2015	Rp. 3,333	Rp. 36,671
		Rp. 36,671	0

Sumber: BPRS Bandar Lampung

1. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara tunai, maka pendapatan *Murabahah* diakui pada saat penyerahan asset *Murabahah* kepada nasabah.

Pada BPRS Bandar Lampung tidak ada yang menggunakan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tunai, sehingga tidak ada jurnal Pengakuan dan Pengukuran.

- m. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara non – tunai, maka pengakuan pendapatan *Murabahah* diakui sebagai berikut:

- 1) Metode Anuitas

- c) Pendapatan *Murabahah* diakui sebesar saldo efektif *Murabahah* yang dikalikan dengan *effective rate*.

- d) Pendapatan *Murabahah* yang diakui tidak boleh melebihi piutang *Murabahah* yang disepakati dalam akad *Murabahah*.

2) Metode Proporsional

Pendapatan *Murabahah* diakui berdasarkan jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah secara proporsional berdasarkan porsi margin *Murabahah* terhadap piutang *Murabahah* pada saat akad ditandatangani.

Pada BPRS Bandar Lampung pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin):

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)

Db Kas/Tabungan nasabah	373.333
Kr Piutang	373.333
Db Margin murabahah yang ditangguhkan	74.178
Kr Pendapatan margin murabahah	74.178

n. Potongan piutang *Murabahah*

- 3) Potongan pelunasan piutang *Murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah* pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.

- 4) Jika potongan pembayaran cicilan piutang *Murabahah* diberikan kepada nasabah karena:

- c) Membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah*; dan atau
- d) Adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.

Pada BPRS Bandar Lampung memberikan potongan pada margin *murabahah* jika nasabah melakukan pelunasan sebelum pada saatnya pembiayaan tersebut berakhir sehingga pihak BPRS memberikan potongan yang

besarnya sesuai dengan kebijakan BPRS dan diberikan setelah dilakukan pelunasan.

Pemberian potongan pelunasan dini(potongan diberikan setelah pelunasan)

Db Kas/Tabungan nasabah 4.106.671

Kr Piutang murabahah 4.106.671

Db Margin murabahah ditangguhkan 219.575

Kr Pendapatan margin murabahah 219.575

Db Beban potongan pelunasan 202.670

Kr Kas/Tabungan nasabah 202.670

BPRS Bandar Lampung memberikan potongan pelunasan margin *murabahah* kepada nasabah yang melakukan pelunasan dini yaitu sebesar 202,670.00,- dan terdapat dalam tabel 5. Berikut rincian potongan pelunasan margin *murabahah*:

Tabel 5

Rincian Potongan Pelunasan Margin *Murabahah*

No	Tanggal Pembayaran	Tanggal Tagih	Pokok (Rp)	Margin (Rp)	Total Angsuran
1	25/09/2014	08/09/2014	299,155.00	74,178.00	373,333.00
2	24/10/2014	08/10/2014	301,929.00	71,404.00	373,333.00
3	25/11/2014	08/11/2014	304,728.00	68,605.00	373,333.00
4	24/12/2014	08/12/2014	307,554.00	65,779.00	373,333.00
5	26/01/2015	08/01/2015	310,406.00	62,927.00	373,333.00
6	25/02/2015	08/02/2015	313,284.00	60,049.00	373,333.00

7	25/03/2015	08/03/2015	316,189.00	57,144.00	373,333.00
8	24/04/2015	08/04/2015	319,120.00	54,213.00	373,333.00
9	25/05/2015	08/05/2015	322,079.00	51,254.00	373,333.00
10	25/06/2015	08/06/2015	325,066.00	48,267.00	373,333.00
11	30/07/2015	08/07/2015	328,080.00	45,253.00	373,333.00
12	25/08/2015	08/08/2015	331,122.00	42,211.00	373,333.00
13	25/09/2015	08/09/2015	334,192.00	39,141.00	373,333.00
	29/09/2015	Penurunan	3,887,096.00	16,905.00	3,904,001.00
	30/09/2015	Diskon		202,670.00	202,670.00

Sumber: BPRS Bandar Lampung

- o. Denda (*ta'zir*) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.

Pada BPRS Bandar Lampung jika terjadi denda (*ta'zir*) dikenakan biaya Rp. 5.000,- perhari sampai dengan tanggal dilaksanakan pembayaran kembali.

Kasus yang terjadi di BPRS Bandar Lampung, Bapak Ali dalam membayar cicilan pada bulan ke-15 tidak bisa membayarnya dan baru bisa membayarnya setelah 10 hari dari tanggal pembayaran. Pada saat akad telah disepakati jika terjadi kelalaian dalam pembayaran akan dikenakan denda Rp. 5.000,- perhari.

Db. Kas / Rekening nasabah 50.000

Kr. Rek Dana Kebajikan 50.000

Perhitungan: 10 x Rp. 5.000,- = Rp. 50.000

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung meliputi: bank tidak melakukan pengakuan dan pengukuran tentang uang muka dan diskon pembelian, piutang *murabahah* diakui pada saat akad, pendapatan dan beban dicatat menggunakan metode anuitas, transaksi dilakukan secara non-tunai, memberikan potongan pelunasan, dan mengenakan denda.

6. Penyajian

Penyajian dalam PAPS I 2013,yaitu:

- a. Uang muka *Murabahah* dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya.

Pada BPRS Bandar Lampung tidak ada uang muka sehingga tidak disajikan sebagai liabilitas lainnya.

- b. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi *Murabahah* dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang *qardh*.

Pada BPRS Bandar Lampung tidak ada nasabah yang membatalkan akad *murabahah*, sehingga tidak ada penyajian.

- c. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah* nasabah kepada Bank.

Pada BPRS Bandar Lampung piutang *murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *murabahah* nasabah kepada Bank, yaitu sebesar Rp. 16.382.621,- yang terdapat dalam tabel 6. Berikut Laporan neraca, yaitu:

Tabel 6

Laporan Neraca

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
	AKTIVA		
1	Kas	266.898	265.622
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
3	Penempatan Pada Bank Lain	13.772.794	7.264.076
4	Piutang Murabahah	16.382.621	8.433.258
5	Piutang Salam	0	0
6	Piutang Istishna'	0	0
7	Pembiayaan Mudharabah	0	0
8	Pembiayaan Musyarakah	0	0

9	Ijarah	0	0
10	Qardh	0	0
11	Piutang Multijasa	30.669.659	24.226.733
12	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	575.239	611.773
13	Aktiva Istishna'	0	0
14	Persediaan	0	0
15	Aktiva Tetap dan Inventaris	988.413	687.979
16	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	498.157	438.216
17	Aktiva Lain-Lain	313.899	274.974
	JUMLAH AKTIVA	61.320.888	40.102.653

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Bandar Lampung pada Desember 2015

- d. Margin *Murabahah* ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *Murabahah*.

Pada BPRS Bandar Lampung telah menyajikan margin *murabahah* ditanggihkan dalam Neraca BPRS dan tidak untuk dipublikasikan, hanya untuk laporan internal BPRS.

- e. Beban potongan pelunasan / angsuran *Murabahah* sebagai pos lawan pendapatan margin *Murabahah*

Pada BPRS Bandar Lampung menyajikan beban potongan pelunasan / angsuran *murabahah* sebagai pos lawan pendapatan margin *murabahah* yang terdapat pada Laporan internal BPRS, dan tidak disajikan untuk publikasi.

- f. Dalam hal Bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* yang belum diamortisasi, disajikan sebagai liabilitas lainnya dan asset lainnya.

Pada BPRS Bandar Lampung menggunakan metode anuitas sehingga pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* yang belum diamortisasi tidak disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya.

- g. Pendapatan margin *Murabahah* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari asset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan margin *Murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.

Pada BPRS Bandar Lampung nasabah yang tergolong *performing* pendapatan margin *murabahah* yang akan diterima disajikan dalam Neraca BPRS, dan nasabah yang tergolong *non-performing* pendapatan margin *murabahah* yang akan diterima disajikan dalam rekening administratif sebesar Rp. 382,257,00 yang terdapat dalam Laporan Komitmen dan Kontijensi yang terdapat dalam Tabel 7.

Tabel 7

Laporan Komitmen dan Kontijensi

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
I	TAGIHAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
III	TAGIHAN KONTINJENSI	382,257	207,890
	a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0

	b. Pendapatan yang Akan Diterima	382,257	207,890
	c. Lainnya	0	0
IV	AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	2,575,652	2,282,575
V	PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	150,000	150,000

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Bandar Lampung pada Desember 2015

- h. Cadangan kerugian penuruanan nilai *Murabahah* disajikan sebagai pos lawan (*contra accaount*) piutang *Murabahah*.

Pada BPRS Bandar Lampung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan terdapat dalam Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya yang terdapat dalam Tabel 8.

Tabel 8

Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

No	Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan Pada Bank Lain	13,687,666	0	0	0	13,687,666
2	Piutang :	46,014,058	521,216	201,500	315,506	47,052,280
	a. Piutang Murabahah	16,206,228	64,711	22,918	88,764	16,382,621
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	0	0	0	0	0
	e. Piutang Multijasa	29,807,830	456,505	178,582	226,742	30,669,659
3	Pembiayaan :	0	0	0	0	0
	a. Mudharabah	0	0	0	0	0
	b. Musyarakah	0	0	0	0	0

4	Ijarah	0	0	0	0	0
5	Jumlah Aktiva Produktif	59,701,724	521,216	201,500	315,506	60,739,946
6	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	188,521	0	0	0	188,521
7	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	-	-	-	-	2.21
8	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	298,508	50,181	100,750	219,245	668,684
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	275,843	50,185	11,460	237,751	575,239
10	KPMM(%)	-	-	-	-	16.47
11	FDR(%)	-	-	-	-	102.67
12	ROA(%)	-	-	-	-	3.96
13	ROE(%)	-	-	-	-	21.73

- i. Denda (*ta'zir*) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (*qardhul hasan*).

Pada BPRS Bandar Lampung denda disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (*qardhul hasan*) pada Desember 2015 sebesar Rp. 90.000,00 yang disajikan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan *Qardhul Hasan* dan terdapat dalam Tabel 9.

Tabel 9

Laporan Sumber dan Penggunaan *Qardhul Hasan*

(Ribuan Rp.)

No	Uraian	Catatan	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
1	Sumber Dana Qardhul Hasan pada Awal Periode		0	0
2	Sumber Dana Qardhul Hasan		-	-

	a. Infaq dan Shadaqah		0	0
	b. Denda		90	750
	c. Sumbangan / Hibah		5.229	520
	d. Pendapatan Non-Halal		18.641	6.706
	e. Lainnya		0	0
	Total Sumber Dana		23.960	7.976
3	Penggunaan Dana Qardhul Hasan		-	0
	a. Pinjaman		0	0
	b. Sumbangan		0	0
	c. Lainnya		0	0
	Total Penggunaan Qardhul Hasan		0	0
4	Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Pengguna		0	0
5	Sumber Dana Qardhul Hasan pada Akhir Periode		0	0

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Bandar Lampung pada Desember 2015

Penyajian yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung meliputi: bank tidak menyajikan uang muka, tidak ada nasabah yang melakukan pembatalan transaksi, dalam laporan keuangan BPRS disajikan piutang *murabahah*, margin *murabahah* ditanggungkan, beban potongan pelunasan/angsuran, cadangan Kerugian penurunan nilai, dan denda, serta pendapatan margin *murabahah* disajikan berdasarkan golongan *performing* dan non- *performing*

7. Pengungkapan

Pengungkapan dalam PAPS I 2013, yaitu:

- e. Rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada BPRS Bandar Lampung terdapat rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah dan kualitas piutang seperti yang terdapat pada tabel 10, jangka waktu terdapat pada tabel 11, jenis penggunaan terdapat pada tabel 12, sektor ekonomi terdapat pada tabel 13, dan cadangan kerugian penurunan nilai terdapat dalam tabel 14. Dan tidak ada piutang berdasarkan jenis valuta pada BPRS Bandar Lampung karena dalam transaksinya hanya menggunakan Rupiah tidak ada mata uang lain.

Tabel 10

Rincian Piutang *Murabahah* Berdasarkan Jumlah dan Kualitas Piutang
(Ribuan Rupiah)

PEMBIAYAAN MURABAHAH				
OUTSTANDING POKOK			OUTSTANDING MARGIN	
	Kol 1	Nasabah		Kol 1
	16,206,227,046	980		5,833,210,918
	Kol 2	Nasabah		Kol 2
	64,711,931	12		11,605,397
	Kol 3	Nasabah		Kol 3
	22,918,192	4		4,635,917
	Kol 4	Nasabah		Kol 4
	88,763,381	33		15,569,035
Jumlah	16,382,620,550	1,029	Jumlah	5,865,021,321

Tabel 11
Rincian Piutang *Murabahah* Berdasarkan Jangka Waktu

(Ribuan Rupiah)

Jangka Waktu	Keterangan	Cust	Total Saldo Pokok	Total Margin/BH/Sewa
006-B	Murabahah Umum	1	75.000.000	9.000.000
012-B	Murabahah Umum	1	90.000.000	1.125.000
018-B	Murabahah Umum	2	6.769.197	969.400
024-B	Murabahah Umum	6	42.333.402	8.374.953
036-B	Murabahah Umum	8	109.580.779	33.315.984
048-B	Murabahah Umum	2	50.842.153	30.136.224
004-B	Murabahah PNS	1	2.565.573	42.428
006-B	Murabahah PNS	1	3.454.899	95.101
007-B	Murabahah PNS	1	5.000.000	379.000
009-B	Murabahah PNS	1	4.611.320	266.461
010-B	Murabahah PNS	4	15.415.403	766.267
011-B	Murabahah PNS	19	30.271.562	1.675.574
012-B	Murabahah PNS	40	273.658.819	25.838.691
013-B	Murabahah PNS	1	3.284.582	65.994
015-B	Murabahah PNS	3	32.252.647	4.222.349
016-B	Murabahah PNS	1	11.585.535	1.760.753
018-B	Murabahah PNS	53	523.453.133	74.417.238
020-B	Murabahah PNS	6	73.417.068	11.785.092
021-B	Murabahah PNS	2	26.924.706	5.107.198

022-B	Murabahah PNS	1	8.481.768	1.649.776
024-B	Murabahah PNS	301	2.622.208.785	520.598.773
027-B	Murabahah PNS	1	9.841.161	2.222.275
028-B	Murabahah PNS	2	48.635.122	14.185.627
030-B	Murabahah PNS	49	778.995.794	195.535.477
031-B	Murabahah PNS	1	11.712.793	3.788.239
033-B	Murabahah PNS	3	54.551.849	17.025.563
036-B	Murabahah PNS	206	3.721.299.162	1.081.059.808
040-B	Murabahah PNS	3	54.724.565	20.525.845
042-B	Murabahah PNS	51	996.071.237	341.656.551
045-B	Murabahah PNS	1	18.817.912	8.287.644
046-B	Murabahah PNS	1	19.721.575	9.593.643
048-B	Murabahah PNS	199	3.970.573.180	1.861.545.251
054-B	Murabahah PNS	6	157.265.582	77.793.848
055-B	Murabahah PNS	1	100.000.000	49.270.000
060-B	Murabahah PNS	37	1.516.793.027	825.847.808
072-B	Murabahah PNS	5	403.470.825	246.875.354
084-B	Murabahah PNS	3	231.350.832	172.253.030
096-B	Murabahah PNS	2	101.637.264	89.462.724
120-B	Murabahah PNS	1	97.087.220	101.787.777
027-B	Murabahah Karyawan	1	23.942.749	1.639.471
048-B	Murabahah Karyawan	1	55.017.370	13.073.130
Jumlah		2.906	16.382.620.550	5.860.798.972

Tabel 12
Rincian Piutang *Murabahah* Berdasarkan Jenis Penggunaan

(Ribuan Rupiah)

	Kol 1	Nsbh	Kol 2	Nsbh	Kol 3	Nsbh	Kol 4	Nsbh
Modal Usaha	91,354,744	5 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah
Investasi	80,108,284	3 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah
Konsumsi	16,034,764,018	972 nasabah	64.711.931	12 nasabah	22.918.192	4 nasabah	88.763.381	33 nasabah
Jumlah	16.206.227.046	980 nasabah	64.711.931	12 nasabah	22.918.192	4 nasabah	88.763.381	33 nasabah

Tabel 13
Rincian Piutang *Murabahah* Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Ribuan Rupiah)

	Kol 1	Nsbh	Kol 2	Nsbh	Kol 3	Nsbh	Kol 4	Nsbh
Perikanan	-	0 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah
Listrik, Gas, dan Air	-	0 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah
Perdagangan Besar dan Eceran	153,762,324	7 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah
Rumah Tangga	-	0 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah	-	0 nasabah
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	16,052,464,722	973 nasabah	64.711.931	12 nasabah	22.918.192	4 nasabah	88.763.381	33 nasabah
Jumlah	16.206.227.046	980 nasabah	64.711.931	12 nasabah	22.918.192	4 nasabah	88.763.381	33

								nasabah
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Tabel 14
Rincian Piutang *Murabahah* Berdasarkan Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai

(Ribuan Rupiah)		
Murabahah	Kol 1	81.031.134
	Kol 2	4.530.468
	Kol 3	11.459.097
	Kol 4	88.763.381
	Kol 5	185.784.081

f. Jumlah piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.

Pada BPRS Bandar Lampung jumlah piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi tidak ada.

g. Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, cadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah.

Metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan adalah metode Anuitas.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yang pada BPRS menerapkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dibentuk berdasarkan kolektibilitas, yaitu: 1). Kol 1: 5% dari saldo pembiayaan; 2). Kol 2: 10% dari saldo pembiayaan dikurang dengan jaminan; 3) Kol 3: 50% dari saldo pembiayaan dikurang dengan jaminan; 4) kol 4: 100% dari saldo pembiayaan dikurang dengan jaminan.

Penghapusan dan Penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah pada BPRS: 1). Penghapusan piutang bermasalah pada BPRS dapat dilakukan sebagai berikut: a). Kondisi pembiayaan bermasalah sudah dalam kolektibilitas macet; b). Pembiayaan bermasalah sudah dalam kolektibilitas diragukan; c). Pada 2 point di atas tersebut nasabah nasabah sudah dilakukan penagihan baik secara

lisan, surat-menyurat (teguran, peringatan) sehingga disimpulkan bahwa nasabah tersebut sangat sulit untuk mengembalikan pembiayaan dalam waktu yang relatif dekat atau nasabah dinilai tidak memungkinkan lagi mempunyai kemampuan untuk mengembalikan. Penghapusan buku pembiayaan dilakukan untuk memperbaiki kondisi/tingkat kesehatan bank dari sisi kualitas aktiva produktif. Pembiayaan yang dihapus buku tetap diupayakan penagihan dan bukan merupakan hapus tagih. 2) Penanganan Pembiayaan bermasalah dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung dengan tujuan untuk meminimalisir pembiayaan yang kemungkinan tidak kembali dan menghindari dilakukannya penghapusan buku, karena pembiayaan bermasalah sangat merugikan bank, yaitu yang berdampak dari penundaan pembayaran mengakibatkan pendapatan tertunda atau bahkan peluang untuk mendapatkan pendapatan dari pembiayaan bermasalah. Cara penanganan pembiayaan bermasalah, antara lain: 1). Dilakukan monitoring daftar pembayaran nasabah untuk mengetahui permasalahan secara dini; 2). Dihubungi langsung nasabah bermasalah untuk disarankan membayar angsuran yang tertunda/tertunggak (didatangi/ditelepon); 3). Bank dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum terhadap jaminan atau kedinasannya apabila yang bersangkutan adalah pegawai.

h. Besarnya piutang *Murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.

Piutang *murabahah* bank yang dibebani sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar kerugian pembiayaan bank tidak ada dalam BPRS.

Penyajian yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung meliputi: bank menyajikan rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai, tidak ada piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang bereleasi, metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan adalah metode anuitas, cadangan kerugian penurunan nilai dan penghapusan dan penanganan piutang bermasalah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, dan tidak ada piutang *murabahah* yang dibebani sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

B. Kesesuaian Penerapan PAPS 2013 Pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS

Bandar Lampung

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada point A, BPRS Bandar Lampung sudah menerapkan PAPS 2013 pada pencatatannya, yaitu:

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a) Uang muka dalam pembiayaan tidak diharuskan ada. Dan pada BPRS Bandar Lampung tidak menerapkan adanya uang. Dengan demikian bank tidak melakukan pengakuan dan pengukuran terhadap uang muka.
- b) Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain. Dalam hal ini, BPRS Bandar Lampung tidak memberikan diskon, dengan demikian tidak ada pengakuan dan pengukuran terhadap diskon harga beli.
- c) Piutang *murabahah* diakui pada saat akad transaksi *murabahah*, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang *murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi. Pada BPRS Bandar Lampung telah menerapkan pencatatan piutang *murabahah* dan menggunakan metode anuitas. Dalam hal ini sesuai dengan PAPSII 2013 bagian IV halaman 4.8.
- d) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* menggunakan metode anuitas. Pada BPRS Bandar Lampung telah mengikuti dan sesuai dengan PAPSII 2013 bagian IV halaman 4.8.
- e) Dalam hal transaksi *murabahah* dilakukan secara tunai, maka pendapatan *murabahah* diakui pada saat penyerahan aset *murabahah* kepada nasabah. Pada BPRS Bandar Lampung tidak ada nasabah yang melakukan transaksi secara tunai.

- f) Dalam hal transaksi *murabahah* dilakukan secara non-tunai, menggunakan metode anuitas. Pada BPRS Bandar Lampung sudah menerapkan hal ini dan sesuai dengan PAPS I 2013 bagian IV halaman 4.8.
- g) Potongan piutang *murabahah*. Pada BPRS Bandar Lampung memberikan potongan piutang *murabahah* untuk nasabah yang melakukan pelunasan dini dan besarnya potongan sesuai dengan kebijakan pihak BPRS. Hal ini sesuai dengan PAPS I 2013 bagian IV halaman 4.9.

Kesesuaian pada Pengakuan dan Pengukuran yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung adalah sesuai dengan PAPS I Tahun 2013 bagian IV tentang pembiayaan *murabahah*.

2. Penyajian

- a) Uang muka *murabahah* dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya. Pada BPRS Bandar Lampung tidak menerapkan uang muka sehingga tidak disajikan pada liabilitas dan neraca BPRS.
- b) Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi *murabahah*. Pada BPRS Bandar Lampung tidak ada nasabah yang membatalkan transaksi sehingga tidak ada penyajian.
- c) Piutang *murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *murabahah* nasabah kepada Bank. Pada BPRS Bandar Lampung piutang *murabahah* disajikan dalam Laporan Neraca. Dalam hal ini sesuai dengan PAPS I 2013 bagian IV halaman 4.9.
- d) Margin *murabahah* ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Pada BPRS Bandar Lampung menyajikan pos margin

murabahah ditangguhkan pada Neraca BPRS. Dalam hal ini sesuai dengan PAPS I 2013 bagian IV halaman 4.9.

- e) Beban potongan pelunasan / angsuran *murabahah* sebagai pos lawan pendapatan margin *murabahah*. Pada BPRS Bandar Lampung disajikan beban potongan pelunasan / angsuran *murabahah* dalam Laporan Internal BPRS.
- f) Dalam hal Bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* yang belum diamortisasi, disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya. Pada BPRS Bandar Lampung menggunakan metode anuitas.
- g) Pendapatan margin *murabahah* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan margin *murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Pada BPRS Bandar Lampung nasabah yang tergolong *performing* disajikan dalam Neraca BPRS, sedangkan nasabah yang tergolong *non-performing* disajikan dalam Laporan Komitmen & Kontijensi. Dalam hal ini sesuai dengan PAPS I 2013 bagian IV halaman 4.10.
- h) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai *murabahah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *murabahah*. Pada BPRS Bandar Lampung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang digunakan pada BPRS adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terdapat pada

Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya. Dalam hal ini sesuai dengan PAPSI 2013 bagian IV halaman 4.10

- i) Denda (*ta'zir*) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (*qardhul hasan*). Pada BPRS Bandar Lampung denda (*ta'zir*) terdapat dalam Laporan Sumber dan Penggunaan *Qardhul Hasan*. Dan hal ini sesuai dengan PAPSI 2013 bagian IV halaman 4.10.

Kesesuaian Penyajian data dalam pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung dapat dinyatakan sesuai dengan PAPSI Tahun 2013 bagian IV tentang pembiayaan *murabahah*.

3. Pengungkapan

- a) Rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan cadangan Kerugian penurunan nilai. Pada BPRS Bandar Lampung, rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan cadangan kerugian penurunan nilai disajikan dalam Laporan Keuangan. Tetapi tidak ada rincian berdasarkan jenis valuta karena pihak BPRS hanya melakukan transaksi dengan menggunakan Rupiah tidak menggunakan mata uang lain. Hal ini sesuai dengan PAPSI 2013 bagian IV halaman 4.15.
- b) Jumlah piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Pada BPRS Bandar Lampung tidak ada.
- c) Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan dan penanganan

piutang *murabahah* yang bermasalah. Pada BPRS Bandar Lampung metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan adalah metode anuitas, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yang pada BPRS Bandar Lampung menggunakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dibentuk berdasarkan kolektibilitas dan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, Penghapusan dan Penanganan piutang bermasalah sesuai dengan kebijakan BPRS.

- d) Besarnya piutang *murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian Bank. Pada BPRS Bandar Lampung tidak ada piutang *murabahah* yang dibebani bersama dengan pihak lain.

Kesesuaian dalam Pengungkapan data pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung, dinyatakan sesuai dengan Pengungkapan yang terdapat dalam PAPS Tahun 2013 bagian IV tentang pembiayaan *murabahah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung adalah (1) Pengakuan dan Pengukuran: pada pengakuan dan pengukuran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2013 bagian IV; (2) Penyajian: pada penyajian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2013 bagian IV tetapi untuk *account margin murabahah* ditangguhkan dan beban potongan pelunasan disajikan dalam Laporan Keuangan Internal bank dan tidak disajikan dalam Laporan Keuangan yang dipublikasi; (3) Pengungkapan: pada pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2013 bagian IV.
2. Dalam hal penerapan PAPSI pada pembiayaan *murabahah*, dapat dinyatakan bahwa BPRS Bandar Lampung sepenuhnya sesuai dengan PAPSI tahun 2013 bagian IV.

B. SARAN

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian ini ada beberapa saran yang dapat di ajukan antara lain:

1. Untuk BPRS Bandar Lampung agar tetap konsisten dalam melakukan pelayanan dan pencatatan pembiayaan yang dilakukan secara terinci.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan referensi atau literatur, dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih

memperluas pembahasannya mengenai pembiayaan *murabahah* yang ada pada PAPSI tahun 2013.

3. Untuk Institusi Pendidikan hendaknya perlu mengikutsertakan PAPSI dalam bahasan akuntansi syariah sebagai salah satu landasan dalam pencatatan dalam akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Nurhayati, Sri dan Warsilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Bandung, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011.
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Rizal, Aji, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Rivai, H Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008.

Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Akademia Permata, Jakarta, 2012.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2014.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Usman, Rachmadi, *Aspek Perbankan Syariah di Indonesia*, Grafika, Jakarta, 2012.

Veithzal, Andria, dan Ferry. *Bank and Financial Institution Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesi (PAPSI) Tahun 2013

Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syaraiah Tahun 2010

Ridwansyah, *Selayang Pandang Bank Syariah Bandar Lampung Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, 2015.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Profil Bank*. 2014

Faridah, Inayah Adi Sari, Bening Wuryandari, *Analisis Penerapan PSAK NO. 59 dan PAPSI pada Akuntansi Pembiayaan di BMT Ma'unah Tegal*, upstegal.ac.id, 2014.

Kiki Priscilia Ramadhani , *Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto)*, jimfeb.ub.ac.id, 2014.

Wadhan, *Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 59 Dan PAPS Di PTAI*, Vol 6, No.2, 2011.

Novan Bastian Dwi Ardha, *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, jimfeb.ub.ac.id, 2014.

Nurul Istikoma, *Penerapan Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah (At Tamwil Bi Al Murabahah) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013*, ejournal.unesa.ac.id, 2014.

<http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/>

<http://www.mui.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BANK SYARIAH BANDAR LAMPUNG

(PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH)



Kantor: Jl. Pangeran Anlatasari No. 148 Bandar Lampung 35133 Telp. 0721-773972 Fax. 0721-773973 e-mail: bprbandarlampung@yahoo.com

SURAT PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) AL-MURABAHAH

No. 003/ SPPP / PMKS / XI / 2014

Bandar Lampung, 02 Juli 2014

Kepada,
Saudara : NAMA-NASABAH
Nama Instansi : ASAL-INSTANSI
Alamat Rumah : ALAMAT-RUMAH

Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Sehubungan dengan permohonan Saudara, tanggal 02 Juli 2014 untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa BPR Syariah Bandar Lampung dapat menyetujui permohonan dimaksud dengan ketentuan dan syarat-syarat sbb :

I. Fasilitas Pembiayaan

Skim Pembiayaan	Al - Murabahah
- Penggunaan	TUJUAN-PENGUNGAN-ALMURABAHAH
- Harga Beli	Rp. 15,000,000
- Margin Keuntungan	Rp. 4,050,000
- Harga Jual	Rp. 19,050,000
- Jangka Waktu	24 Bulan
- Angsuran Perbulan	Rp. 793,750
Biaya - biaya	
- Biaya Administrasi	Rp. 150,000
- Biaya Provisi	Rp. 0
- Asuransi	Rp. 238,500

II. Jaminan

- Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji
- Surat Kuasa Pemotongan Gaji an. NAMA-NASABAH
- HARTA-PRIBADI-YANG-DIJAMINKAN an. NAMA-NASABAH

III. Persyaratan-persyaratan

a. Persyaratan Umum:

1. Angsuran kepada PT. BPR Syariah Bandar Lampung merupakan prioritas pertama sebelum pengeluaran lainnya.
2. Menyalurkan gaji dan penerimaan lainnya ke PT. BPR Syariah Bandar Lampung, minimal sebesar angsuran pembiayaan.
3. Selama pembiayaan belum lunas, nasabah diwajibkan menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tulisan, yang dapat mempengaruhi pekerjaan Nasabah sebagai Pegawai kepada PT. BPR Syariah Bandar Lampung.
4. Setiap keterlambatan angsuran akan dikenakan biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) perhari dari setiap angsuran tertunggak.
5. Tanpa persetujuan dari Bank, Nasabah tidak diperkenankan mengajukan pembiayaan ke Bank lain.
6. Memberitahukan secara tertulis, jika Nasabah bermaksud mengundurkan diri sebagai Pegawai, paling lambat 30 hari sebelum pengunduran diri.
7. Jika Nasabah Wanprestasi atas kewajiban pembayaran, PT. BPRS Bandar Lampung berhak untuk melakukan penagihan melalui publikasi pada Media Masa.

b. Persyaratan Pencairan:

1. Pemohon telah menyerahkan SP3 yang sudah ditandatangani.
2. Pemohon menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan.
3. Pemohon telah membuka rekening tabungan di PT. BPR Syariah Bandar Lampung.
4. Pemohon telah menandatangani Bukti Penerimaan Uang atas Pembiayaan yang dicairkan.
5. Pemohon telah ditutup asuransi jiwa dengan bankers clause PT. BPR Syariah Bandar Lampung selama masa pembiayaan.

Demikian kami sampaikan, sebagai tanda persetujuan mohon kiranya surat ini ditandatangani dan dikembalikan ke PT. BPR Syariah Bandar Lampung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini. Apabila dalam masa tersebut tidak ada tanggapan dari pemohon maka PT. BPR Syariah Bandar Lampung setiap saat dapat membatalkan dan mengubah kondisi serta persyaratan SP3 ini.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

Menyetujui syarat-syarat dan ketentuan diatas,

BPR Syariah Bandar Lampung

materai 6000

NAMA-NASABAH
Pemohon

Nama-Pimpinan
Direktur Utama



BANK SYARIAH BANDAR LAMPUNG

(PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH)



Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung 35133 Telp. 0721-773972 Fax. 0721-773973 e-mail : bprsbandarlampung@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

WAKALAH AL-MURABAHAH SURAT KUASA

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada ALLAH Tuhannya..." (QS. Al-Baqarah (2): 283)

Wakalah ini dibuat dari ditandatangani pada hari **RABU** tanggal **02 Juli 2014** oleh dan antara pihak-pihak:

1. Nama : Nama-Pimpinan
Jabatan : Direktur PT. BPR Syariah Bandar Lampung
Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.148 Tanjung Baru Bandar Lampung

Bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama PT. BPR Syariah Bandar Lampung, selanjutnya disebut BANK.

2. Nama : NAMA-NASABAH
No. KTP : NOMOR-KTP
Nama Instansi : ASAL-INSTANSI
Alamat : ALAMAT-RUMAH

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut NASABAH.

Sehubungan dengan telah disetujuinya permohonan pembiayaan NASABAH yang akan digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif senilai **Rp. 15.000.000 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH)**, maka dengan ini pihak BANK memberi kuasa kepada NASABAH untuk melakukan pembelian barang (daftar terlampir) mewakili atas nama BANK.

Sebagai bukti telah dilakukan transaksi jual beli, maka NASABAH diwajibkan memberikan bukti transaksi berupa daftar pembelian barang dan atau nota/kuwitansi pembelian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan.

Dan atas transaksi jual beli tersebut, jika terjadi hal-hal yang tidak berkenan berkaitan dengan barang yang dibeli (kerusakan, fisik, warna, dll) bukan menjadi tanggungjawab pihak BANK.

Demikian wakalah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 02 Juli 2014

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa

NAMA-NASABAH
Nasabah

Nama-Pimpinan
Direktur



BANK SYARIAH BANDAR LAMPUNG

(PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH)



Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung 35133 Telp. 0721-773972 Fax. 0721-773973 e-mail : bprbandarlampung@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(Surat Al-Baqarah 2 : 275)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

(Surat An-Nisaa' 4 : 29)

AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH

No. 003 / MRB / PEG / PMKS / X / 14

Pada hari ini, RABU tanggal 02 Juli 2014 telah terjadi kesepakatan dan ditandatangani Akad pembiayaan Al-Murabahah oleh dan antara pihak-pihak :

1. Nama : Nama-Pimpinan
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR Syariah Bandar Lampung
Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 148 Sukarame Bandar Lampung

Bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama PT. BPR Syariah Bandar Lampung, selanjutnya disebut BANK.

2. Nama : NAMA-NASABAH
No. KTP : NOMOR-KTP
Nama Instansi : ASAL-INSTANSI
Alamat : ALAMAT-RUMAH

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut NASABAH.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, benar NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah kepada BANK untuk membeli barang yang halal berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana lampiran dalam Akad ini, dan selanjutnya BANK menyetujui, untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Akad ini.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan prinsip Syariah, Pembiayaan BANK kepada NASABAH diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - NASABAH ditunjuk untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan NASABAH dengan Pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK.
 - Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada NASABAH dengan persetujuan dan sepengetahuan BANK.
 - NASABAH membayar harga Pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, oleh karenanya sebelum NASABAH membayar lunas harga Pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, NASABAH masih berutang kepada BANK.

Selanjutnya kedua belah pihak telah mufakat dan setuju atas isi dan bunyi perjanjian jual beli Al-Murabahah sebagaimana tersebut pada pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

- (1) Untuk memenuhi perjanjian jual-beli Al-Murabahah ini BANK menunjuk dan memberi wakalah kepada NASABAH bertindak dan atas nama BANK melakukan pembelian barang-barang tersebut pada daftar barang yang akan dibeli dalam lampiran surat perjanjian ini.

- (2) Barang yang telah dibeli tersebut pada ayat 1 diatas selanjutnya dijual oleh BANK kepada NASABAH dengan harga yang telah disepakati bersama, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	:	Al-Murabahah
Piafond Pembiayaan	:	Rp. 15,000,000
Jangka Waktu Pembiayaan	:	24 Bulan
Total Harga Beli	:	Rp. 15,000,000
Margin	:	Rp. 4,050,000
Harga Jual	:	Rp. 19,050,000

Sehingga jumlah utang NASABAH terhadap BANK sebesar Rp. 19,050,000 (*SEMBILAN BELAS JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH*).

Pasal 2 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut pada pasal 1 akad ini dalam jangka waktu 24 bulan terhitung dari tanggal 02 Juli 2014 dan akan lunas seluruhnya tanggal 02 Juli 2016. Tabel angsuran pembayaran terlampir.
- (2) Untuk tertibnya pelunasan pembiayaan Al Murabahah tersebut tepat waktu NASABAH akan mengangsur sebagai pelunasan utang. Angsuran dimaksud akan diatur sebagai berikut:
- NASABAH akan mengangsur pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-24, adalah sebesar Rp. 793,750,- (*TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH*).
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja kembali.

Pasal 3 TEMPAT PEMBAYARAN

Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor PT. BPR Syariah Bandar Lampung.

Pasal 4 BIAYA - BIAYA

NASABAH dikenakan biaya administrasi, biaya materai, premi asuransi jiwa dan pembukaan Rekening Tabungan Wadiah bagi yang belum memiliki tabungan di PT. BPR Syariah Bandar Lampung.

Pasal 5 JAMINAN

- (1) Untuk menjamin tertibnya pembayaran pokok Pembiayaan dan Margin Keuntungan bagi BANK tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :
- Surat Kuasa Pernyataan Bendaharawan Gaji
 - Surat Kuasa Pemotongan Gaji an, ~~NAMA-NASABAH~~
 - HARTA-PRIBADI-YANG-DIJAMINKAN an, ~~NAMA-NASABAH~~
- (2) NASABAH menyetujui bahwa jika dianggap perlu BANK dapat menjaminkan kembali jaminan tersebut kepada pihak ketiga atau BANK lain sebagai jaminan gadai ulang.

Pasal 6
KELALAIAN MELUNASI UTANG

- (1) Untuk tertibnya angsuran pembiayaan, NASABAH diwajibkan mengangsur dengan jadwal yang telah disepakati, dan apabila terjadi keterlambatan angsuran yang disebabkan oleh kelalaian NASABAH terhitung sejak tanggal jatuh tempo bulanan, NASABAH dikenakan sanksi yang bertujuan memperbaiki kedisiplinan atas kesepakatan yang telah ditandatangani sebesar Rp. 5.000,- perhari sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.
- (2) Besarnya sanksi denda yang dibebankan kepada NASABAH akan dibukukan sebagai Dana Syiar dan bukan menjadi dana pendapatan BANK.
- (3) Jika NASABAH lalai dan tidak dapat membayar lunas utang yang timbul dari pembelian barang secara AL-Murabahah tersebut pada waktunya, maka BANK berhak mengambil kembali barang-barang tersebut untuk dijual kembali sebagai pelunasan utang NASABAH.
- (4) Jika hasil penjualan barang-barang AL-Murabahah tersebut tidak cukup untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas dari sumber lain yang akan dia peroleh dikemudian hari.

Pasal 7
PENGAKUAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut, bahwa :

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya.
2. NASABAH menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari pihak ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
3. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.

Pasal 8
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlakunya Akad ini, NASABAH, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan – perbuatan untuk memindahkan barang AL-Murabahah tersebut.

Pasal 9
RISIKO

NASABAH atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnyanya dokumen-dokumen atau surat – surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak Akad ini ditandatangani seluruh risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH, dan karena itu pula NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala risiko tersebut.

Pasal 10
PENGAWASAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau pihak / petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan / pemeriksaan terhadap barang jaminan

Pasal 11
PEMBERIAN KUASA

NASABAH dengan ini memberikan kuasa secara penuh kepada BANK untuk sewaktu-waktu mengalihkan piutang ini kepada pihak lain sesuai kepentingan BANK.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian – bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat mengenal perjanjian pembiayaan dan segala akibat yang timbul padanya mengenal aspek perdata (perdagangan / pembiayaan) kedua belah pihak memilih Lembaga Arbitrase BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan mengenal aspek pidana kedua belah pihak memilih domisili yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
- (3) Putusan Lembaga Arbitrase BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) bersifat final dan mengikat.

Pasal 13
LAIN – LAIN

Akad Pembiayaan Al Murabahah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akad - akad lainnya yang berhubungan dengan Akad ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian pembiayaan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.
- (2) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- (3) Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- (4) Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK bermaterai cukup.

Ditandatangani di : Bandar Lampung

Tanggal : 02 Juli 2014

BANK

Nasabah

materai 6000

(Nama-Pimpinan)

(NAMA-NASABAH)

SAKSI – SAKSI

Tanda Tangan

1. Nama : Saksi1
Pekerjaan : Kabag Pemasaran
Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 148 Tanjung Baru
Bandar Lampung

2. Nama : Saksi2
Pekerjaan : Account Officer
Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 148 Tanjung Baru
Bandar Lampung

TABEL ANGSURAN PEMBAYARAN

Nama Nasabah : Nama-Nasabah
Instansi : Asal Instansi MoU
Alamat Rumah : Alamat Rumah

Angsuran	Bulan & Tahun	Jumlah Angsuran	Outstanding
JUMLAH HUTANG			19,050,000
1	02 Agustus 2014	793,750	18,256,250
2	02 September 2014	793,750	17,462,500
3	02 Oktober 2014	793,750	16,668,750
4	02 Nopember 2014	793,750	15,875,000
5	02 Desember 2014	793,750	15,081,250
6	02 Januari 2015	793,750	14,287,500
7	02 Februari 2015	793,750	13,493,750
8	02 Maret 2015	793,750	12,700,000
9	02 April 2015	793,750	11,906,250
10	02 Mei 2015	793,750	11,112,500
11	02 Juni 2015	793,750	10,318,750
12	02 Juli 2015	793,750	9,525,000
13	02 Agustus 2015	793,750	8,731,250
14	02 September 2015	793,750	7,937,500
15	02 Oktober 2015	793,750	7,143,750
16	02 Nopember 2015	793,750	6,350,000
17	02 Desember 2015	793,750	5,556,250
18	02 Januari 2016	793,750	4,762,500
19	02 Februari 2016	793,750	3,968,750
20	02 Maret 2016	793,750	3,175,000
21	02 April 2016	793,750	2,381,250
22	02 Mei 2016	793,750	1,587,500
23	02 Juni 2016	793,750	793,750
24	02 Juli 2016	793,750	0
Total		19,050,000	

Menyetujui,

Bandar Lampung, 02 Juli 2014
PT.BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNGNama-Nasabah
NasabahNama-Pimpinan
Direktur

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Bandar Lampung

Jl. Raya Nater Muara Putik No. 10, Kec. Nater

Periode: Desember-2015

Laporan Neraca

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
	AKTIVA		
1	Kas	266,898	265,622
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
3	Penempatan Pada Bank Lain	13,772,794	7,264,076
4	Piutang Murabahah	16,382,621	8,433,258
5	Piutang Salam	0	0
6	Piutang Istishna'	0	0
7	Pembiayaan Mudharabah	0	0
8	Pembiayaan Musyarakah	0	0

9	Ijarah	0	0
10	Qardh	0	0
11	Piutang Multijasa	30,669,659	24,226,733
12	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	575,239	611,773
13	Aktiva Istishna'	0	0
14	Persediaan	0	0
15	Aktiva Tetap dan Inventaris	988,413	687,979
16	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	498,157	438,216
17	Aktiva Lain-Lain	313,899	274,974
	JUMLAH AKTIVA	61,320,888	40,102,653

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Bandar Lampung

Jl. Raya Nater Muara Putik No. 10, Kec. Nater

Periode: Desember-2015

Laporan Neraca

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
-----------	----------------	-----------------------------	-----------------------------

	PASIVA		
1	Kewajiban Segera	94,825	166,958
2	Tabungan Wadiah	3,469,730	2,917,093
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
4	Kewajiban Lain-Lain	38,656,400	20,965,111
5	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
6	Pinjaman Subordinasi	0	0
7	Modal Pinjaman	0	0
8	Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
	a. Tabungan Mudharabah	684,932	493,903
	b. Deposito Mudharabah	9,879,700	9,454,700
9	Ekuitas :	0	0
	a. Modal Disetor	8,500,000	7,500,000
	b. Tambahan Modal Disetor	42,000	42,000
	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
	d. Cadangan	14,254	14,254
	e. Saldo Laba(Rugi)	(20,953)	(1,451,366)
	JUMLAH PASIVA	61,320,888	40,102,653

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Bandar Lampung
Jl. Raya Nater Muara Putik No. 10, Kec. Nater
Periode: Desember-2015**

Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
I	TAGIHAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
III	TAGIHAN KONTINJENSI	382,257	207,890
	a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
	b. Pendapatan yang Akan Diterima	382,257	207,890
	c. Lainnya	0	0
IV	AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	2,575,652	2,282,575

V	PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	150,000	150,000
---	---	---------	---------

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Bandar Lampung
Jl. Raya Nater Muara Putik No. 10, Kec. Nater
Periode: Desember-2015

Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

No	Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan Pada Bank Lain	13,687,666	0	0	0	13,687,666
2	Piutang :	46,014,058	521,216	201,500	315,506	47,052,280
	a. Piutang Murabahah	16,206,228	64,711	22,918	88,764	16,382,621
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	0	0	0	0	0

	e. Piutang Multijasa	29,807,830	456,505	178,582	226,742	30,669,659
3	Pembiayaan :	0	0	0	0	0
	a. Mudharabah	0	0	0	0	0
	b. Musyarakah	0	0	0	0	0
4	Ijarah	0	0	0	0	0
5	Jumlah Aktiva Produktif	59,701,724	521,216	201,500	315,506	60,739,946
6	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	188,521	0	0	0	188,521
7	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	-	-	-	-	2.21
8	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	298,508	50,181	100,750	219,245	668,684
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	275,843	50,185	11,460	237,751	575,239
10	KPMM(%)	-	-	-	-	16.47
11	FDR(%)	-	-	-	-	102.67
12	ROA(%)	-	-	-	-	3.96
13	ROE(%)	-	-	-	-	21.73

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Bandar Lampung
Jl. Raya Nater Muara Putik No. 10, Kec. Nater
Periode: Desember-2015**

Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan

(Ribuan Rp.)

No	Uraian	Catatan	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
1	Sumber Dana Qardhul Hasan pada Awal Periode		0	0
2	Sumber Dana Qardhul Hasan		-	-
	a. Infaq dan Shadaqah		0	0
	b. Denda		90	750
	c. Sumbangan / Hibah		5,229	520
	d. Pendapatan Non-Halal		18,641	6,706
	e. Lainnya		0	0
	Total Sumber Dana		23,960	7,976
3	Penggunaan Dana Qardhul Hasan		-	-
	a. Pinjaman		0	0
	b. Sumbangan		0	0
	c. Lainnya		0	0
	Total Penggunaan Qardhul Hasan		0	0
4	Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Pengguna		0	0
5	Sumber Dana Qardhul Hasan pada Akhir Periode		0	0

Pengurus Bank	Pemilik Bank
Dewan Komisaris: A.Rahman Mustafa, SE,MM,Ak Yusran Effendi, S.E., M.M.	Pemegang Saham: Pemda. Kota Bandar Lampung (87.98%) 28 Pemegang Saham Lainnya (12.02%)
Direksi: Ismail Saleh, S.H.i. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy. Marsono, S.E.	Pemegang Saham Pengendali:

* Laporan Keuangan Publikasi ini telah diaudit oleh H.R. Weddie Andriyanto, S.E.,

* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

** Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)*

Provinsi Lampung, 31 - Desember-2015
DIREKSI
Bandar Lampung

KANTOR : 01 S/D 01
 DAFTAR PEMBIAYAAN BY PRODUK dan JK-WAKTU PERTANGGAL : 31122015

Prd	J-Waktu	Keterangan	Cust	Total Saldo Pokok	Total Margin/BH/Sewa
01	006-B	MURABAHAH UMUM	1	75,000,000.00	9,000,000.00
01	012-B	MURABAHAH UMUM	1	90,000,000.00	1,125,000.00
01	018-B	MURABAHAH UMUM	2	6,769,197.00	969,400.00
01	024-B	MURABAHAH UMUM	6	42,333,402.00	8,374,953.00
01	036-B	MURABAHAH UMUM	8	109,580,779.00	33,315,984.00
01	048-B	MURABAHAH UMUM	2	50,842,153.00	30,136,224.00
07	005-B	PIUTANG MULTIJASA	2	16,070,123.00	796,837.00
07	006-B	PIUTANG MULTIJASA	5	18,786,998.00	930,502.00
07	007-B	PIUTANG MULTIJASA	5	4,526,343.00	84,372.00
07	008-B	PIUTANG MULTIJASA	4	12,045,052.00	863,179.00
07	009-B	PIUTANG MULTIJASA	3	22,608,127.00	2,024,650.00
07	010-B	PIUTANG MULTIJASA	9	91,634,832.00	6,935,670.00
07	011-B	PIUTANG MULTIJASA	18	26,881,932.00	1,608,620.00
07	012-B	PIUTANG MULTIJASA	61	409,653,465.00	39,353,961.00
07	015-B	PIUTANG MULTIJASA	4	23,528,526.00	2,596,171.00
07	017-B	PIUTANG MULTIJASA	3	32,334,218.00	4,464,612.00
07	018-B	PIUTANG MULTIJASA	45	631,694,591.00	95,349,035.00
07	020-B	PIUTANG MULTIJASA	6	83,245,925.00	13,337,163.00
07	021-B	PIUTANG MULTIJASA	3	17,132,094.00	1,593,892.00
07	022-B	PIUTANG MULTIJASA	2	6,407,563.00	641,171.00
07	023-B	PIUTANG MULTIJASA	1	12,844,964.00	2,644,168.00
07	024-B	PIUTANG MULTIJASA	453	4,223,143,872.00	788,013,157.00
07	025-B	PIUTANG MULTIJASA	2	10,169,092.00	2,632,358.00
07	026-B	PIUTANG MULTIJASA	5	37,962,121.00	7,863,701.00
07	027-B	PIUTANG MULTIJASA	2	23,775,955.00	4,538,393.00
07	028-B	PIUTANG MULTIJASA	5	88,699,298.00	21,330,202.00
07	030-B	PIUTANG MULTIJASA	105	1,529,054,915.00	375,452,093.00
07	031-B	PIUTANG MULTIJASA	1	5,813,982.00	929,183.00
07	033-B	PIUTANG MULTIJASA	3	82,773,514.00	26,237,985.00
07	034-B	PIUTANG MULTIJASA	2	47,165,991.00	16,017,978.00
07	035-B	PIUTANG MULTIJASA	1	16,533,901.00	1,383,599.00
07	036-B	PIUTANG MULTIJASA	430	6,730,149,686.00	1,962,904,238.00
07	039-B	PIUTANG MULTIJASA	1	23,578,815.00	9,685,800.00
07	040-B	PIUTANG MULTIJASA	2	53,601,768.00	17,226,100.00
07	042-B	PIUTANG MULTIJASA	170	2,996,701,292.00	986,005,939.00
07	044-B	PIUTANG MULTIJASA	3	62,274,552.00	28,334,840.00
07	045-B	PIUTANG MULTIJASA	1	34,505,042.00	17,043,891.00
07	047-B	PIUTANG MULTIJASA	1	7,632,257.00	1,522,770.00
07	048-B	PIUTANG MULTIJASA	372	7,978,747,794.00	3,621,078,423.00
07	054-B	PIUTANG MULTIJASA	31	859,566,339.00	418,922,266.00
07	060-B	PIUTANG MULTIJASA	82	2,952,518,826.00	1,821,735,118.00
07	065-B	PIUTANG MULTIJASA	1	23,526,835.00	6,606,965.00
07	072-B	PIUTANG MULTIJASA	6	317,227,272.00	212,250,644.00
07	075-B	PIUTANG MULTIJASA	1	21,440,459.00	7,232,872.00
07	093-B	PIUTANG MULTIJASA	1	28,291,180.00	8,273,021.00
07	096-B	PIUTANG MULTIJASA	3	163,369,259.00	143,586,979.00
07	108-B	PIUTANG MULTIJASA	2	128,769,392.00	123,385,470.00
07	114-B	PIUTANG MULTIJASA	1	33,000,000.00	37,620,000.00
07	120-B	PIUTANG MULTIJASA	10	516,062,605.00	566,343,662.00
07	144-B	PIUTANG MULTIJASA	3	119,831,918.00	164,445,860.00
08	006-B	MULTIJASA UMUM	1	100,000,000.00	12,000,000.00
08	015-B	MULTIJASA UMUM	1	4,726,696.00	1,153,304.00
08	024-B	MULTIJASA UMUM	1	5,804,619.00	1,555,381.00
08	048-B	MULTIJASA UMUM	1	12,097,787.00	592,245.00
08	060-B	MULTIJASA UMUM	2	21,747,571.00	10,892,438.00
09	004-B	MURABAHAH PNS	1	2,565,573.00	42,428.00
09	006-B	MURABAHAH PNS	1	3,454,899.00	95,101.00
09	007-B	MURABAHAH PNS	1	5,000,000.00	379,000.00
09	009-B	MURABAHAH PNS	1	4,611,320.00	266,461.00
09	010-B	MURABAHAH PNS	4	15,415,403.00	766,267.00
09	011-B	MURABAHAH PNS	19	30,271,562.00	1,675,574.00
09	012-B	MURABAHAH PNS	40	273,658,819.00	25,838,691.00
09	013-B	MURABAHAH PNS	1	3,284,582.00	65,994.00
09	015-B	MURABAHAH PNS	3	32,252,647.00	4,222,349.00
09	016-B	MURABAHAH PNS	1	11,585,535.00	1,760,753.00
09	018-B	MURABAHAH PNS	53	523,453,133.00	74,417,238.00

OTOR : 01 S/D 01
 JAFAR PEMBIAYAAN BY PRODUK dan JK-WAKTU PERTANGGAL : 31122015

Prd	J-Waktu	Keterangan	Cust	Total Saldo Pokok	Total Margin/BH/Sewa
09	020-B	MURABAHAH PNS	6	73,417,068.00	11,785,092.00
09	021-B	MURABAHAH PNS	2	26,924,706.00	5,107,198.00
09	022-B	MURABAHAH PNS	1	8,481,768.00	1,849,776.00
09	024-B	MURABAHAH PNS	301	2,622,208,785.00	520,598,773.00
09	027-B	MURABAHAH PNS	1	9,841,161.00	2,222,275.00
09	028-B	MURABAHAH PNS	2	48,635,122.00	14,185,627.00
09	030-B	MURABAHAH PNS	49	778,995,794.00	195,535,477.00
09	031-B	MURABAHAH PNS	1	11,712,793.00	3,788,239.00
09	033-B	MURABAHAH PNS	3	54,551,849.00	17,025,563.00
09	036-B	MURABAHAH PNS	206	3,721,299,162.00	1,081,059,808.00
09	040-B	MURABAHAH PNS	3	54,724,565.00	20,525,845.00
09	042-B	MURABAHAH PNS	51	996,071,237.00	341,656,551.00
09	045-B	MURABAHAH PNS	1	18,817,912.00	8,287,644.00
09	046-B	MURABAHAH PNS	1	19,721,575.00	9,593,643.00
09	048-B	MURABAHAH PNS	199	3,970,573,180.00	1,861,545,251.00
09	054-B	MURABAHAH PNS	6	157,265,582.00	77,793,848.00
09	055-B	MURABAHAH PNS	1	100,000,000.00	49,270,000.00
09	060-B	MURABAHAH PNS	37	1,516,793,027.00	825,847,808.00
09	072-B	MURABAHAH PNS	5	403,470,825.00	246,875,354.00
09	084-B	MURABAHAH PNS	3	231,350,832.00	172,253,030.00
09	096-B	MURABAHAH PNS	2	101,637,264.00	89,462,724.00
09	120-B	MURABAHAH PNS	1	97,087,220.00	101,787,777.00
11	027-B	MURABAHAH KARYAWAN	1	23,942,749.00	1,839,471.00
11	048-B	MURABAHAH KARYAWAN	1	55,017,370.00	13,073,130.00
Printed By : marifat 01012016 16:45:27			2,906	47,052,279,908.00	17,463,072,199.00

1. Rekapitulasi Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan

Bulan Desember 2015

NO	SANDBI	JENIS PENGGUNAAN	KOL.1 Outstanding	Nasabah	KOL.2 Outstanding	Nasabah	KOL.3 Outstanding	Nasabah	KOL.4 Outstanding	Nasabah	JUMLAH	Nasabah
1	10	Modal Usaha	Rp 216.944,170	12 Org	Rp 6.459,465	1 Org	-	0 Org	Rp 206,008	1 Org	Rp 223,509,643	14 Org
2	40	Investasi	Rp 158,216,570	6 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	Rp 158,216,570	6 Org
3	70	Konsumsi	Rp 45,438,997,795	2757 Org	Rp 514,758,373	41 Org	Rp 201,499,821	10 Org	Rp 315,297,706	78 Org	Rp 46,670,553,695	2886 Org
JUMLAH PEMBIAYAAN			Rp 46,444,058,535	2775 Org	Rp 521,217,838	42 Org	Rp 201,499,821	10 Org	Rp 315,503,714	79 Org	Rp 47,052,279,908	2906 Org

2. Rekapitulasi Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi

NO	SANDBI	JENIS SEKTOR EKONOMI	KOL.1 Outstanding	Nasabah	KOL.2 Outstanding	Nasabah	KOL.3 Outstanding	Nasabah	KOL.4 Outstanding	Nasabah	JUMLAH	Nasabah
1	1002	Pertanian	Rp -	0 Org	Rp -	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	Rp 4,066,523	0 Org
2	1005	Lisrik Gas dan Air	Rp 4,066,523	1 Org	Rp -	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	Rp 4,066,523	1 Org
3	1007	Perdagangan Besar dan Eceran	Rp 370,994,217	17 Org	Rp 6,459,465	1 Org	-	0 Org	Rp 206,008	1 Org	Rp 377,659,690	19 Org
4	1019	Rumah Tangga	Rp 100,000,000	1 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	Rp 100,000,000	1 Org
5	1020	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	Rp 45,368,997,795	2758 Org	Rp 514,758,373	41 Org	Rp 201,499,821	10 Org	Rp 315,297,706	78 Org	Rp 46,570,553,695	2885 Org
JUMLAH PEMBIAYAAN			Rp 46,044,058,535	2775 Org	Rp 521,217,838	42 Org	Rp 201,499,821	10 Org	Rp 315,503,714	79 Org	Rp 47,052,279,908	2906 Org

2

PEDOMAN INTERVIEW

Nama : Jumhuri

Jabatan : *Accounting*

Daftar pertanyaan:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* yang ada pada BPRS Bandar Lampung sudah menggunakan PPSI 2013?
2. Sejak kapan BPRS Bandar Lampung menerapkan PPSI 2013 sebagai landasan dalam pencatatan akuntansi?
3. Bagaimana bentuk jurnal pembiayaan *murabahah* yang ada pada BPRS Bandar Lampung?
4. Kapankah pengakuan piutang *murabahah* dilakukan pada BPRS Bandar Lampung?
5. Metode apa yang ditetapkan pada BPRS Bandar Lampung untuk pengakuan pendapatan?
6. Apakah pada BPRS Bandar Lampung memberikan diskon jika terjadi pelunasan lebih awal pada pembiayaan *murabahah*?
7. Apakah pendapatan dari biaya administrasi di amortisasi setiap bulannya sepanjang masa akad?
8. Apakah dalam Laporan Keuangan BPRS Bandar Lampung terdapat akun piutang *murabahah*, margin *murabahah* ditangguhkan, beban potongan pelunasan/angsuran, dan cadangan kerugian penurunan nilai?
9. Apakah pendapatan margin *murabahah* yang akan diterima disajikan berdasarkan golongan *performing* dan *non-performing*?

10. Apabila terdapat nasabah yang lalai dalam membayar cicilan, berapakah denda (*ta'zir*) yang diberikan kepada nasabah perharinya?
11. Berapakah besarnya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang ada pada BPRS Bandar Lampung?

Nama : Dede Ali Ma'rifat

Jabatan : Admin Pembiayaan

Daftar Pertanyaan:

1. Berapa jumlah pembiayaan *murabahah* yang ada pada BPRS Bandar Lampung sampai dengan 31 Desember 2015?
2. Bagaimana jadwal angsuran yang ada pada BPRS Bandar Lampung?
3. Bagaimana bentuk Laporan Keuangan pembiayaan yang ada pada BPRS Bandar Lampung?
4. Adakah rincian piutang *murabahah* berdasarkan pada jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai?

Nama : Marsono

Jabatan : Direktur

Daftar Pertanyaan:

1. Siapa saja yang menggunakan pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung?
2. Untuk apa saja pembiayaan *murabahah* yang ada pada BPRS Bandar Lampung?
3. Bagaimana alur pembiayaan *murabahah* yang ada pada BPRS Bandar Lampung?
4. Persyaratan atau dokumen apa saja yang harus dilengkapi jika ingin melakukan pembiayaan *murabahah*?
5. Apakah ada uang muka yang harus dibayarkan oleh nasabah jika ingin menggunakan pembiayaan *murabahah*?
6. Apakah BPRS Bandar Lampung memberikan diskon pembelian dari pemasok?
7. Apakah ada nasabah BPRS Bandar Lampung yang melakukan pembatalan atas transaksi yang telah disepakati?
8. Apa yang dilakukan BPRS Bandar Lampung untuk Penghapusan dan Penanganan piutang *murabahah* yang bermasalah?

Nama : Roslina

Jabatan : Kepala Bagian BPRS dan Umum

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pada BPRS Bandar Lampung pencatatan cadangan kerugian penurunan nilai *murabahah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *murabahah*?
2. Apakah ada piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi?
3. Apakah pada BPRS Bandar Lampung ada pihak lain di luar bank yang menanggung besarnya piutang *murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank?



BANK SYARIAH BPRS BANDAR LAMPUNG



Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung 35133 Telp. 0721 - 773972 Fax. 0721 773973 e-mail : bprsbandarlampung@yahoo.com

Nomor : 48/03/Dir/OP/BL/II/2016
Lampiran : -

Bandar Lampung, 12 Pebruari 2016

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Raden Intan Lampung
di
Bandar Lampung

Perihal : Kesediaan Memberikan Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Menunjuk surat Saudara Nomor : In.09/DE/PP.00.9/53/2016 Tanggal 21 Januari 2016 perihal : Permohonan Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan untuk memberikan Izin Riset kepada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung dengan data sebagai berikut :

Nama : Nindi Riyana Saputri
NPM : 1221040212
Jurusan : Ekonomi Islam (EI)
Judul Penelitian : "Penerapan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Pada Pembiayaan Murabahah"
Lokasi Penelitian : BPRS Bandar Lampung

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Billahittaufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ridwansyah, M.E.Sy.
Direktur Utama





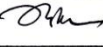
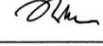

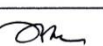
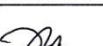


DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nindi Riyana Saputri
NPM : 1251010171
Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak
Pembimbing II : Ridwansyah, M.E.Sy
Judul Skripsi : Penerapan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah
Indonesia (PAPSI) Pada Pembiayaan *Murabahah*

No	Tanggal Konsultasi	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	27 November 2015	Seminar Proposal Pembimbing I dan II		✓
2	13 Januari 2016	Konsultasi Proposal BAB I ke Pembimbing II		✓
3	15 Januari 2016	ACC Proposal oleh Pembimbing II dan diminta melanjutkan sampai BAB V		✓
4	17 Maret 2016	Menyerahkan BAB I-V kepada Pembimbing II		✓
5	18 Maret 2016	ACC BAB I-V kepada Pembimbing II		✓
6	15 Januari 2016	Konsultasi Proposal BAB I ke Pembimbing I dan diminta melanjutkan sampai BAB III	<i>Any Eliza</i>	
7	26 Februari 2016	Menyerahkan BAB I-III kepada Pembimbing I	<i>Any Eliza</i>	
8	11 Maret 2016	Perbaikan BAB I-II dengan Pembimbing I	<i>Any Eliza</i>	
9	18 Maret 2016	Menyerahkan BAB I-III kepada Pembimbing I	<i>Any Eliza</i>	
10	24 Maret 2016	Perbaikan BAB I-IV	<i>Any Eliza</i>	

		dengan Pembimbing I		
11	28 Maret 2016	Menyerahkan BAB I-IV kepada Pembimbing I		
12	1 April 2016	Perbaikan BAB IV dengan Pembimbing I		
13	5 April 2016	Menyerahkan BAB I-V kepada Pembimbing I		
14	8 April 2016	Perbaikan BAB IV-V dengan Pembimbing I		
15	15 April 2016	Konsultasi dan Perbaikan BAB IV-V dengan Pembimbing I		
16	18 April 2016	Menyerahkan BAB I-V kepada Pembimbing I		
17	21 April 2016	Perbaikan BAB I, IV, V, dan abstrak dengan Pembimbing I		
18	22 April 2016	ACC untuk dimunaqosahkan oleh Pembimbing I dan II		

Bandar Lampung, 22 April 2016

PEMBIMBING I



Anv Eliza, S.E., M.Ak
NIP.198308152006042004

PEMBIMBING II



Ridwansyah, M.E.Sy.
NIP. 197401082011011001